

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta menyerap aspirasi masyarakat.
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. bahwa untuk mendukung kebijakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ maka perlu disusun dan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjadi pedoman / acuan dalam setiap kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin yang berisikan visi, misi dan arah pembangunan daerah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
  2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181).
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 )
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 ).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

14. Peraturan .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 5).
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 14).
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 27).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 35).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Kerja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
dan  
BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN : .....**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005-2025.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
5. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu wilayah, daerah atau kawasan.
22. Sasaran adalah tujuan langsung hal yang diupayakan agar betul-betul tercapai dengan pemusatan segala perhatian, kemampuan dan sumber daya.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
24. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak direncanakan.
25. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi.
26. Kelemahan/keadala adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi.
27. Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.
28. Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi.
29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional.
30. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yangb memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
31. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
32. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
33. Prasarana adalah sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu agar sistem transportasi, teknik penychatan, pengairan, telekomunikasi, dan sebagainya dapat berfungsi.
34. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

## **BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

- (2) Rincian Program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) RPJP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi, dan program Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

## **BAB III SISTEMATIKA RPJP**

### **Pasal 5**

Sistematika RPJP sebagaimana dimaksud peraturan daerah terdiri dari :

- I. PENDAHULUAN
- II. KONDISI UMUM
- III. VISI DAN MISI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- IV. ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
- V. PENUTUP

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan arah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu penyesuaian atau suatu perubahan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

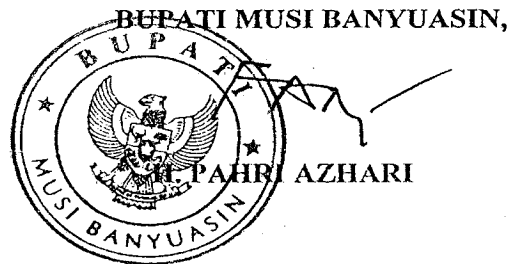
Ketentuan mengenai RPJM daerah yang telah ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam RPJP daerah ini.

**Pasal 9**

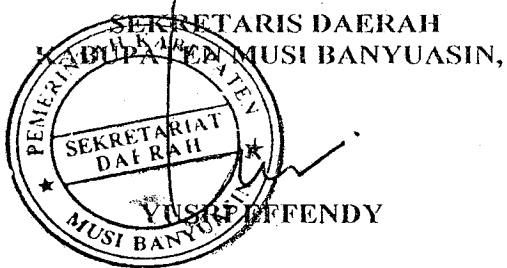
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 31 JULI 2008



Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 31 JULI 2008



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 40**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
(RPJP)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2005-2025**



## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Tujuan dan Sasaran	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 2
1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 5
1.5. Sistematika	I - 6
<b>BAB II KONDISI UMUM</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Aspek Fisik	II - 5
2.1.1. Letak geografis dan Batas Administrasi	II - 5
2.1.2. Morfologi	II - 6
2.1.3. Iklim	II - 6
2.1.4. Hidrologi	II - 6
2.1.5. Kondisi Tanah	II - 7
2.1.6. Pola Penggunaan Lahan	II - 8
2.2. Aspek Kependudukan	II - 9
2.2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	II - 9
2.2.2. Kepadatan Penduduk	II - 10
2.2.3. Tingkat Pendidikan	II - 11
2.2.4. Ketenagakerjaan	II - 12
2.2.5. Tingkat Kesejahteraan Penduduk	II - 14
2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II - 15
2.2.7. Kesehatan	II - 16
2.2.8. Kemiskinan dan desa tertinggal	II - 17
2.3. Perekonomian Wilayah	II - 19
2.3.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	II - 19
2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi	II - 23
2.3.3. Struktur Ekonomi	II - 24
2.3.4. Pendapatan Perkapita	II - 26
2.3.5. Posisi Potensi dan Prediksi Sub Sektor Ekonomi	II - 28
2.3.6. Potensi Sektor/Subsektor Strategis 2005-2025	II - 33
2.3.7. Potensi Sektor/Subsektor Strategis selama 4 Periode	II - 38
2.4. Aspek Sarana dan Prasarana	II - 43
2.4.1. Sarana Sosial Ekonomi	II - 43
2.4.2. Prasarana Wilayah	II - 45
2.5. Tantangan	II - 52
<b>BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005-2025</b>	<b>III - 1</b>
3.1. Visi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	III - 1
3.2. Misi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	III - 4
<b>BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>IV - 1</b>
4.1. Arah Pembangunan Jangka panjang Tahun 2005-2025	IV - 6
4.1.1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	IV - 6

4.1.2. Mewujudkan Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat	IV -12
4.1.3. Mengembangkan Pemerintahan yang Adil, Jujur, dan Bersih	IV -15
4.2. Tahapan dan Skala Prioritas	IV -16
4.2.1. RPJM Ke-1	IV -16
4.2.2. RPJM Ke-2	IV -17
4.2.3. RPJM Ke-3	IV -18
4.2.4. RPJM Ke-4	IV -19

<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>V - 1</b>
----------------------	--------------

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	II - 5
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin	II - 9
Tabel 2.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin	II - 10
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin	II - 10
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 12
Tabel 2.6	Jumlah Perusahaan dan Karyawan di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 13
Tabel 2.7	Jumlah Keluarga dan Tahapan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 14
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	II - 16
Tabel 2.9	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut jenisnya di kabupaten Musi Banyuasin	II - 17
Tabel 2.10	Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 17
Tabel 2.11	Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Musi Banyuasin	II - 18
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin	II - 20
Tabel 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	II - 20
Tabel 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menurut Lapangan Usaha	II - 21
Tabel 2.15	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku	II - 23
Tabel 2.16	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan	II - 23
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan	II - 24
Tabel 2.18	Struktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan ( Dengan Migas )	II - 25
Tabel 2.19	Struktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan tanpa Migas	II - 25
Tabel 2.20	Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar harga Konstan	II - 26
Tabel 2.21	Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar harga Berlaku	II - 26
Tabel 2.22	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002-2005	II - 27
Tabel 2.23	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004	II - 32
Tabel 2.24	Posisi dan Perkembangan Sub-Sektor Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin	II - 41
Tabel 2.25	Prioritas Pengembangan Sektor/subsektor Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode pembangunan 2005-2025	II - 42

## DAFTAR GAMBAR

---

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 6
Gambar 2.1	Peta Sebaran Potensi Sumber Daya Alam	V - 2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan desentralisasi dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Propinsi. Karena itu dibutuhkan proses dan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang telah diberikan.

Sistem perencanaan yang bersifat menyeluruh, terpadu sistematis dan tanggap terhadap perubahan jaman telah ditetapkan dengan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Adapun tujuan diselenggarakannya penyusunan rencana adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan dan kendali bagi pelaksanaan pembangunan,
- b) Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan,
- c) Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah baik Pusat dan daerah,
- d) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
- e) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
- f) Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan jangka waktu perencanaan, maka sistem Perencanaan yang ditetapkan menurut undang-undang ini ada 3 (tiga) jenis Perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun tahapan Penyusunan Rencana yaitu Evaluasi Kinerja, Penyusunan rencana, musyawarah perencanaan, serta pengesahan rencana.

Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan amanat UU No 25/2004 tentang SPPN perlu menyusun Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

sebagai pedoman bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai arahan, pedoman dan kendali bagi perencanaan yang terarah dan terpadu guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Muba.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.2.1 Tujuan**

Menyiapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Jangka Waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, agar perencanaan lebih terarah, terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin.

### **1.2.2 Sasaran**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang dimiliki Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar dalam penetapan rumusan Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Merumuskan Visi dan Misi Daerah sebagai Kondisi yang diharapkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang (2005-2025)
3. Merumuskan arah pembangunan daerah sebagai strategi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang (2005 – 2025).

## **1.3 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagai pedoman bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai arahan, pedoman dan kendali bagi perencanaan yang terarah dan terpadu guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Muba.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.2.1 Tujuan**

Menyiapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Jangka Waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, agar perencanaan lebih terarah, terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin.

### **1.2.2 Sasaran**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang dimiliki Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar dalam penetapan rumusan Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Merumuskan Visi dan Misi Daerah sebagai Kondisi yang diharapkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang (2005-2025)
3. Merumuskan arah pembangunan daerah sebagai strategi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang (2005 – 2025).

## **1.3 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 Nomor 5).



13. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2002 Nomor 14)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 6).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 27).

#### 1.4 HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

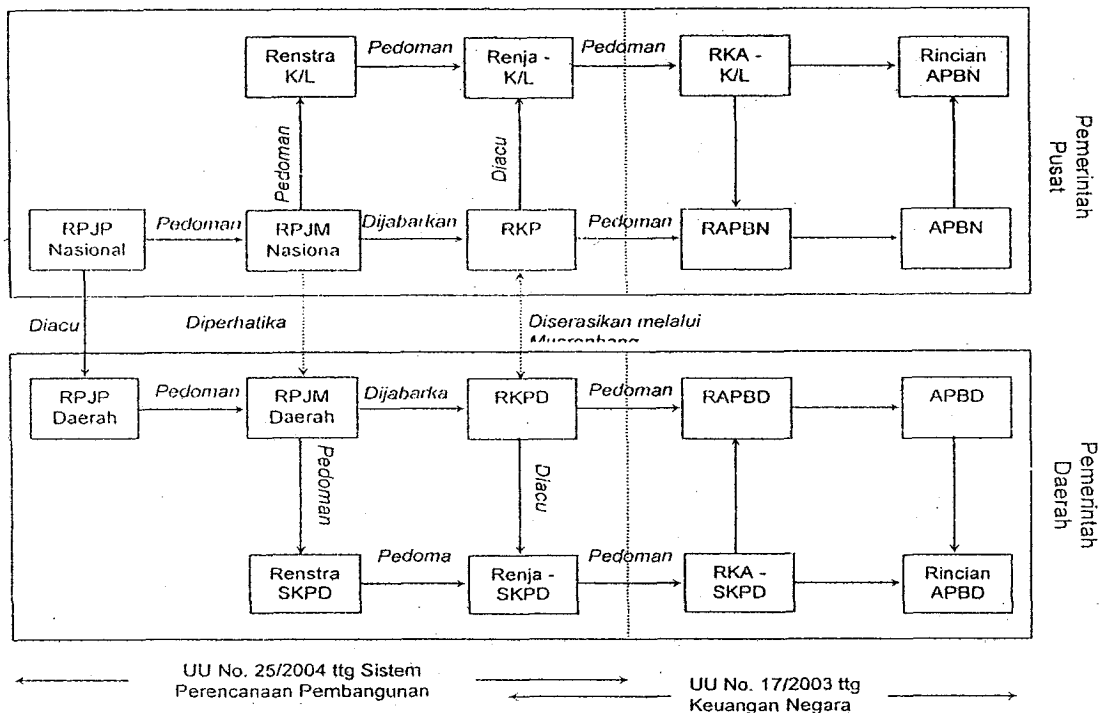
Dalam kaitan dengan **sistem perencanaan pembangunan** sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan 20 tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam dua puluh tahun mendatang dan tetap mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. RPJP ini sekaligus akan menjadi acuan bagi seluruh kelompok pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk visi dan misi calon kepala daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutnya, dalam kaitan dengan **sistem keuangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJP dan RPJM Daerah kedalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Banyuasin

Gambaran tentang hubungan antara RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar - 1.1.

Gambar 1.1.

Hubungan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5 SISTEMATIKA

Secara garis besar sistematika bahasan meliputi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Bab 2 Kondisi Umum**

Bab ini berisi tinjauan secara umum terhadap kondisi serta analisis potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin.

**Bab 3 Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin**

Bab ini berisi visi dan misi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta arah kebijakan umum Daerah yang merupakan strategi untuk mencapai Visi dan Misi Daerah.

#### **Bab 4 Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan**

Bab ini berisi sasaran percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sasaran peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dan sasaran pembangunan pemerintahan yang jujur, adil, dan bersih, arah pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh ) tahunan serta tahapan dan skala prioritas

#### **Bab 5 Penutup**

Bab ini berisi uraian kata penutup dari bahasan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025.

## BAB II KONDISI UMUM

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Seiring terbentuknya BKR ( Badan Keamanan Rakyat ) Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu. BKR Musi Banyuasin dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi dua wakil pimpinan, yaitu A. Munandar Wasyik (Wakil Pimpinan I), serta Nawawi Gaffar dan A.Kosim Dahayat (Wakil Pimpinan II).

Ditengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda, pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini berisikan antara lain membagi tingkatan Badan-Badan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota Besar. Tingkatan yang lebih bawah lagi belum dapat ditentukan karena nama-nama di tiap daerah /kota besar berbeda-beda. Namun Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kota Kecil, Negeri, Marga, dan lain-lain yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Presiden yang mempunyai kuasa perundang-undangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian melantik Abdul Malik sebagai Wali Negara Sumatera Selatan untuk masa empat tahun, sedangkan DPR-nya dilantik oleh *Regening Comisoris Besture Aongelegenheden* (Recomba) pada bulan April 1948. Negara Sumatera Selatan dibentuk dengan alasan sebagai embrio salah satu anggota Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan datang. Pembentukan Negara Sumatera Selatan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Marga Panukal Abab dari Musi Banyuasin.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian Renville, diadakan pertemuan antara pihak Republik dengan Belanda yang bertempat di Lahat. Pada pertemuan tersebut ditetapkan garis statisko Daerah Musi Banyuasin hanya mencakup sebagian Kewedanaan Musi Ilir di bagian utara yang meliputi Marga Lawang Wetan, Marga Babat, Marga Sanga Desa, Marga Pinggap, dan Marga Tanah Abang.

Pada 18 Maret 1950 dibubarkan Negara Sumatera Selatan dan disahkan sebagai Negara Serikat oleh RIS pada 25 Maret 1950 yang kemudian disusul penetapan Daerah Istimewa Bangka Belitung pada 22 April 1950.

Sejak saat itu susunan pemerintah di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan. Untuk Keresidenan Palembang terdiri dari 6 Kabupaten dengan 14 Kewedanaan. Susunan tingkat pemerintahan dan status Pemerintahan Otonomi tersebut masih tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 meskipun Undang Undang RIS yang diberlakukan.

Sebagai ganti Undang-Undang diterbitkan PP Nomor 3 Tahun 1950, diantaranya menetapkan bahwa Badan Pekerja yang semula hanya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera Selatan dan DPRS yang memiliki sendiri ketua dan wakil ketuanya. Namun PP Nomor 3 Tahun 1950 belum dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Kepala Daerah bersama-sama Badan Pekerja masih tetap menjalankan segala tugasnya yang semula menjadi tanggung jawab Gubernur atau Bupati.

Masih dalam rangka penataan pemerintahan di daerah, diterbitkan pula PP Nomor 39 Tahun 1950 yang menetapkan Propinsi Sumatera Selatan (termasuk Lampung dan Bengkulu) dibagi atas 14 (empat belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Besar Palembang, serta 1 (satu) calon Kota Besar Tanjung Karang atau Teluk Betung. Sebagai pelaksanaannya terlebih dahulu dibentuk dewan-dewan kabupaten yang baru terbentuk 4 (empat) dewan kabupaten, yaitu tiga di Lampung dan satu di Bengkulu. Selanjutnya PP Nomor 39 Tahun 1950 tersebut dibekukan sebagai akibat mosi dari Hadi Kusumo. Sehingga dengan demikian pembentukan Dewan Kabupaten dan sekaligus Kabupaten Musi Banyuasin tertunda hingga tahun 1954.

Berhubung pembentukan kabupaten terus semakin mendesak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Mendagri) Nomor 2 Tahun 1951 dan dengan alasan demi kemajuan demokrasi dan revolusi maka para pemuka masyarakat, kalangan DPR dan Gubernur mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 1954, yang antara lain menetapkan agar segera menata Pemerintahan Marga yang maksudnya agar pemerintahan marga ini menjadi sendi dasar yang kokoh dari pemerintahan atasan dengan menggunakan hak otonomi menurut hukum asli. Hal ini memudahkan penyesuaian diri dengan pembentukan otonomi daerah sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang sedang ditinjau kembali.

Ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi yang berhak mengurus diri sendiri itu, kelihatannya mendapat pengakuan Kolonial Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya *Indis Gemente Ordonanti Buitinguresten* (IGOB) Stl 1938 Nomor 490 yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga.

Berhubung penataan pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah menampakkan hasil yang positif, karena disamping dapat mengatur diri sendiri juga ditaati rakyat sehingga pemerintah marga terkesan lebih efektif dan dihormati oleh rakyat. Sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 diberlakukan kembali, diadakan pembentukan desa percobaan sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil, yaitu Desa Rantau Bayur pada tahun 1953.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembentukan kabupaten otonom, sementara menunggu ketentuan lebih lanjut SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1951 tanggal 25 Februari 1951, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera mengeluarkan Surat Instruksi Kebijaksanaan Nomor: GB.30/ 1/1951 dan Surat Gubernur tanggal 10 Juli 1951 Nomor: D.P /9/ 1951 tentang persyaratan dan kriteria Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom.

Sebagai realisasi kedua surat tersebut, Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom (PPKO) mulai melaksanakan tugasnya. Sebagai dasar pembentukan kabupaten adalah wilayah kewedanaan dengan tolok ukur sebagai berikut:

- a. Penduduk yang berjumlah sekitar 300.000 jiwa,
- b. Daerah pertanian bahan makanan (beras) dan hasil bumi ekspor,
- c. Pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan untuk ekspor-impor,
- d. Perhubungan yang sederhana baik jalan darat maupun air, dan
- e. Hubungan sejarah dan pertalian darah antara rakyat setempat.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dibentuklah Kabupaten Musi Ilir-Banyuasin yang merupakan gabungan dari Kewedanaan Musi Ilir dan Kewedanaan Banyuasin yang dimasukkan dalam lingkup Kabupaten Palembang Ilir, Selain itu terdapat dua kewedanaan lain yang masuk lingkup Kabupaten Palembang Ilir, yaitu Kewedanaan Lematang/Ogan Tengah dan Rawas. Akan tetapi hasil kerja PPKO dan DPD Propinsi Sumatera Selatan tidak berlanjut, sehingga kewedanaan masih berfungsi sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor: 26 Tahun 1959. Dengan Undang Undang baru ini, terbentuklah Kabupaten-kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya, termasuk diantaranya Kabupaten Musi Ilir Banyuasin dengan jumlah penduduk 463.803 jiwa, yang ibukotanya Sekayu.

Sebagai titik tolak kegiatan reformasi dan rekonstruksi dibidang pemerintahan periode 1957-1965, adalah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu ini diharapkan mampu memperkuat struktur politik disamping sebagai landasan dasar untuk melakukan penataan bidang pemerintahan sebagai peralihan dari sistem otokrasi birokrasi kepada sistem demokrasi yang berkedaulatan dan otonom.

Bagi Daerah Musi Banyuasin, sebelum terbentuknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan Perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi Ilir-Banyuasin pada tanggal 28 September 1956, berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya R.Ahmad Abusamah sebagai Kepala Daerah, Zainal Abidin Nuh sebagai Bupati, dan Ki.H.Mursal dari Partai Masyumi sebagai Ketua DPR. Kemudian diperkokoh dengan Undang Undang Nomor:28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dan Kot Praja di Sumatera Selatan.

Gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang Undang Pengganti UUD Sementara RIS, mengakibatkan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUD Sementara RIS tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut peristiwa ini, semua produk hukum yang bersumber pada UUD Sementara RIS diadakan penyesuaian kembali, bahkan ada yang diganti dengan produk hukum yang bersumber pada UUD 1945. Sementara menunggu ketetapan lebih lanjut, demi kelangsungan roda pemerintahan di daerah maka dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan isi Bab II Pasal 14 Ayat 1, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah diubah menjadi Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin, disingkat dengan Daswati II Musi Banyuasin.

Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah Badan Pemerintah Harian (BPH). Namun saat itu pembentukan BPH masih belum memungkinkan maka Bupati Kepala Daerah masih dibantu Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Pada saat dilantiknya Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, seluruh kantor pemerintahan masih berada di Kota Praja Palembang, kecuali Kantor Pekerjaan Umum dan Kesehatan yang telah berada di Sekayu. Hal ini disebabkan pada waktu pembentukan kabupaten otonom oleh PPKO, Kabupaten otonom Musi Banyuasin tergabung dalam Kabupaten Palembang Ilir di bawah Keresidenan Palembang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des.52/2/37-34 tanggal 1 April 1963 secara resmi ditetapkan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Daswati II Musi Banyuasin.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2002 tanggal 10 April 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi



Sumatera Selatan, maka Kabupaten Musi Banyuasin dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu dan Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai.

## 2.1 ASPEK FISIK

### 2.1.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu mempunyai luas 14.263,40 Km<sup>2</sup>, secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin terletak 1,3<sup>0</sup> - 4<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 103<sup>0</sup> - 104,45<sup>0</sup> Bujur Timur. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Jambi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Sesuai dengan Perda No. 32/2005 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang semula terbagi atas 9 kecamatan menjadi 11 kecamatan dengan total luas wilayah ± 14.265,96 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Babat Toman	1.397,50
2	Batanghari Leko	2.107,79
3	Sanga Desa	317,00
4	Sungai Keruh	629,00
5	Sekayu	701,60
6	Lais	755,53
7	Sungai Lilin	885,28
8	Keluang	400,57
9	Bayung Lencir	6.699,19
10	Plakat Tinggi	372,50
11	Lalan	1.028,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.265,96</b>

Sumber : Perda No. 32/2005 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

### 2.1.2 Morfologi

Secara morfologi, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu sebagai berikut :

1. Daerah dataran rendah (0 – 2 %), pelamparannya meliputi daerah yang luas, terletak di bagian Utara, Timur dan Selatan dengan luas penyebaran 789.305,83 Ha. Beberapa sungai besar dan kecil mengalir pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini dengan kuantitas air yang tidak banyak terpengaruh oleh perubahan musim. Sungai-sungai yang ada umumnya mengalir berkelok-kelok dan airnya cukup tenang. Dengan adanya aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun dan tak banyak terpengaruh oleh perubahan musim tersebut, maka kondisi seperti ini sangat mendukung untuk dilaksanakannya beberapa program pembangunan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Daerah menggelombang (2 – 15 %), satuan morfologi ini menempati daerah yang cukup luas, terdapat di bagian Barat, Tengah, Selatan, dan setempat-setempat di bagian Utara dengan luas penyebaran 520.630,86 Ha.
3. Daerah perbukitan (15 – 40 %), penyebarannya terdapat di bagian Barat dan Tengah dengan luas 116.629,31 Ha.

### 2.1.3 Iklim

Seperti wilayah Indonesia lainnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki iklim tropika basah. Berdasarkan data curah hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, bulan Mei sampai bulan September memiliki curah hujan yang relatif rendah (< 200 mm/bulan), sedangkan bulan Oktober sampai bulan April memiliki curah hujan yang relatif tinggi (> 200 mm/bulan).

Dengan kondisi iklim tersebut, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat potensial untuk pengembangan berbagai kegiatan pertanian.

### 2.1.4 Hidrologi

Berdasarkan pola aliran sungai dan sifat tata airnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi wilayah dataran kering dan rawa.

Sungai-sungai yang ada pada daerah rawa mempunyai pola aliran *rectangular* (cabang sungai tegak lurus), sedangkan di wilayah dataran kering pola aliran sungainya *dendritik* (menjari).

Pada sungai-sungai besar aliran airnya ada sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh perubahan musim secara signifikan, sehingga pada sungai-sungai jenis ini dapat dipergunakan sebagai moda transportasi antara lain Sungai Musi, Sungai Teluk Tenggulang, dan Sungai Lalan.

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik keberadaan air permukaan umumnya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan umumnya langka selain disebabkan menurunnya curah hujan juga disebabkan batuan penyusunnya umumnya kedap air sehingga pemunculan mata air langka di daerah ini.

Menurut debit airnya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan DAS Musi memiliki debit rata-rata 763 M<sup>3</sup>/detik, DAS Air Lalan seluas 8.605 Km<sup>2</sup> memiliki debit rata-rata 301,2 m<sup>3</sup>/detik, DAS Air Calik 227,6 m<sup>3</sup>/detik, debit rata-rata DAS Banyuasin 513 m<sup>3</sup>/detik dan DAS Air Sugihan dengan luas 2.069 Km<sup>2</sup>.

#### **2.1.5 Kondisi Tanah**

##### **A. Tekstur Tanah**

Dilihat dari tekstur tanahnya, seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tekstur tanah halus (liat) dan tekstur tanah sedang (lempung). Tekstur halus memberikan konotasi bahwa bahan tanah tersebut didominasi oleh fraksi liat, walaupun mungkin terdapat fraksi yang lain seperti debu dan pasir, tetapi proporsinya relatif rendah. Tekstur tanah sedang tersusun dari campuran fraksi liat, debu dan pasir dalam proporsi yang seimbang. Secara teknis tekstur tanah demikian disebut lempung. Peran tekstur tanah secara kimia dalam menentukan tingkat kesuburannya, akan tergantung pada jenis mineralogi bahan penyusunnya.

Dengan kondisi tekstur tanah tersebut diatas, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian.

##### **B. Jenis Tanah**

Di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, secara umum jenis tanah yang ada berdasarkan sistem taksonomi tanah dari USDA dan Puslitanak (1999) meliputi :

- Jenis tanah entisol (aluvial) yang sebarannya terdapat di daerah dataran yang terbentuk oleh aktivitas sungai Musi. Selain di daerah dataran Sungai Musi, jenis

tanah Entisols ini juga banyak ditemukan di daerah-daerah endapan sungai lainnya seperti Sungai Calik dan Sungai Lalan.

- Jenis tanah inceptisol (glei) di yang sebarannya terdapat di daerah-daerah rawa belakang dan dataran Sungai Musi, Sungai Calik dan Sungai Lalan, Jenis tanah ini juga mendominasi daerah endapan pantai yang ada di sebelah timur Kecamatan Bayung Lencir. Sebagian besar wilayah ini adalah merupakan daerah pasang surut, dengan fluktuasi muka air yang relatif kontinyu.
- Jenis tanah Histosols (tanah organik) yang sebarannya sebagian besar terdapat di Kecamatan Bayung Lencir bagian timur.
- Jenis tanah ultisols (podsolik) ini banyak menempati daerah-daerah dengan bentuk wilayah berombak hingga berbukit.

### C. Kedalaman Efektif Tanah

Secara umum kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, adalah lebih dari 90 cm. Keadaan ini tentu secara dini dapat memberikan indikasi bahwa lahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Selain lahan-lahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm juga ditemukan lahan yang kedalaman efektifnya antara 60 hingga 90 cm, namun penyebaran luasannya relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan yang lebih dari 90 cm.

#### 2.1.6 Pola Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan/tanah di Kabupaten Musi Banyuasin dibedakan dalam 15 (lima belas) jenis penggunaan. Jenis penggunaan tanah yang penyebarannya paling luas berupa Hutan Primer dengan luas 535.421,57 Ha atau 37,53 % dari luas total Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penggunaan lahan lainnya yang penyebarannya cukup luas yaitu berupa kebun rakyat dengan 312.613,30 Ha atau 21,91 % dari luas kabupaten, selanjutnya perkebunan besar dengan 127.215,63Ha atau 8,92 % dari luas wilayah kabupaten disusul kebun campuran dengan 121.538,79 Ha atau 8,52 % dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan penggunaan terbesar ke empat. Sedangkan jenis penggunaan lahan/tanah lainnya penyebarannya relatif lebih kecil jika dibandingkan keempat penggunaan di atas.

## 2.2 ASPEK KEPENDUDUKAN

### 2.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Sampai dengan tahun 2005, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 475.793 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 1,45 % per tahun. Dengan gambaran tersebut maka melalui pendekatan formula deret ukur;  $P_n = P_0(1+r)^n$ , dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010 akan menjadi 513.606 jiwa, tahun 2015 menjadi 628.748 jiwa atau sebesar 769.131 jiwa pada akhir masa perencanaan (tahun 2025).

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin,**  
**Tahun 2002 - 2005**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		2002	2003	2004	2005
1	Babat Toman	62.391	62.707	65.559	46.075
2	Batanghari Leko	15.446	15.524	16.341	21.445
3	Sanga Desa	24.852	24.988	26.924	28.946
4	Sekayu	63.421	63.764	65.010	70.071
5	Lais	51.185	51.457	52.991	55.368
6	Sungai Keruh	33.811	33.981	34.313	32.024
7	Sungai Lilin	63.022	63.326	66.280	65.952
8	Keluang	23.052	23.157	23.758	26.097
9	Bayung Lencir	105.558	106.069	109.918	75.294
10	Plakat Tinggi <sup>*)</sup>	-	-	-	19.514
11	Lalan <sup>*)</sup>	-	-	-	37.215
<b>Jumlah</b>		<b>442.738</b>	<b>444.973</b>	<b>461.293</b>	<b>475.793</b>

Sumber: - Muba Dalam Angka, Tahun 2002 s/d 2005

Keterangan : <sup>\*)</sup> Perda No. 32/2005 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

**Tabel 2.3**  
**Pertumbuhan Penduduk**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Tahun 2003 - 2005**

No	Tahun	Pertumbuhan Penduduk(%)
1	2003	-
2	2004	3,81
3	2005	3,00

*Sumber: Hasil Perhitungan*

### 2.2.2 Kepadatan Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, keadaan yang kontradiktif terlihat pada kecamatan Batanghari Leko. Kecamatan dengan wilayah yang relatif luas (nomor dua setelah Kecamatan Bayung Lencir) ini memiliki jumlah penduduk paling sedikit (4,51 % dari keseluruhan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin) dengan tingkat kepadatan 10 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan keadaan tersebut kecamatan ini tentu memerlukan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk dapat mengelola sumberdaya yang ada terutama sumber daya alamnya.

**Tabel 2.4**  
**Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2005**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Babat Toman	1.397,50	46.075	32
2	Batanghari Leko	2.107,79	21.445	10
3	Sanga Desa	317,00	28.946	91
4	Sungai Keruh	629,00	32.024	51
5	Sekayu	701,60	70.071	100
6	Lais	755,53	53.160	70
7	Sungai Lilin	885,28	65.952	74
8	Keluang	400,57	26.097	65
9	Bayung Lencir	6.699,19	75.294	11
10	Plakat Tinggi <sup>1)</sup>	372,50	19.514	52
11	Lalan <sup>1)</sup>	1.028,00	37.215	36
<b>Jumlah</b>		<b>14.265,96</b>	<b>475.793</b>	<b>33</b>

*Sumber: BPS Kab.Muba , Tahun 2005*

### 2.2.3 Tingkat Pendidikan.

Untuk mengetahui kualitas penduduk dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinyatakan dalam tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu angka harapan hidup, pendidikan berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, dan standar pengeluaran perkapita. Berdasarkan data yang diambil dari master plan lumbung energi Sumatera selatan, IPM Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2002 cukup tinggi yaitu 64,6 no urut ke 4 setelah Palembang, OKU, dan Lahat, meningkat menjadi 68,1 tahun 2006.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dapat dilihat dari jumlah siswa putus sekolah serta anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kab. Muba pada tahun 2002 berjumlah 4500 orang dan menurun di tahun 2005 berjumlah 1367 orang atau terjadi penurunan 69 %.

Untuk angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan tahun 2005, APK untuk SD/Mi 118,13 % dan APM sebesar 99,42 %. Untuk SMP dan Mts APK 71,81 % dan APM 55,66 %. Sedangkan untuk SMU,MA, SMK APK sebesar 34,93 % dan APM sebesar 22,21 %. Untuk tahun 2006 APK untuk SD/Mi 116,36 % dan APM sebesar 98,83 %. Untuk SMP dan Mts APK 85,75 % dan APM 69,21 %. Sedangkan untuk SMU,MA, SMK APK sebesar 51,65 % dan APM sebesar 41,13 %. Hasil kinerja pembangunan bidang pendidikan 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tamat SD mengalami peningkatan dari 77.062 orang di tahun 2002 meningkat 81.007 orang di tahun 2005. SMP 19.750 meningkat 22.089 di tahun 2005, dan SMA berjumlah 4000 di tahun 2002 meningkat menjadi 9.426 di tahun 2005.

Namun secara umum berdasarkan data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi penduduk yang dominan berpendidikan SD/MI sebesar 69,78 % dan SMP/MTs 19,03 %, sedangkan tingkat pendidikan SLTA/MA/SMK yakni sekitar 10,02 % bahkan yang tidak sekolah (7 – 12 tahun) sekitar 1,18 %.

Atas dasar kondisi tersebut, maka tantangan yang dihadapi bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas, manajemen pendidikan dan partisipasi dalam bidang pendidikan.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Di Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2005**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	SD/MI	81.007	69,78
2	SMP/MTs	22.089	19,03
3	SMA/MA	9.426	8,12
4	SMK	2.206	1,90
5	Tak Sekolah	1.367	1,18
<b>Jumlah</b>			<b>100,00</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Muba 2005*

#### 2.2.4 Ketenagakerjaan

Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digambarkan berdasarkan penduduk usia kerja apabila diasumsikan bahwa penduduk usia 0 s.d 15 tahun sekitar 30 % dan penduduk usia diatas 60 tahun sekitar 10 %, dan jumlah angkatan kerja adalah 60 % dari jumlah penduduk , maka jumlah angkatan kerja di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2003 sebanyak 266.983 orang, tahun 2004 sebanyak 277.153 orang dan tahun 2005 sebanyak 285.475 orang

Berdasarkan data Disnaker dan Kessos, pada tahun 2002 jumlah Pengangguran tenaga kerja usia produktif ( 16 s/d 60 tahun) sebanyak 38.720 orang , tahun 2003 berjumlah 32.20 orang, dan tahun 2005 21.839 orang . Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2002 , 14,58 % dari penduduk usia produktif adalah penganggur , tahun 2003 , 8,87 % dari penduduk usia produktif adalah penganggur. Dan pada tahun 2005 , 7,65 % dari penduduk usia produktif merupakan pengangguran. Hal ini menunjukkan penurunan angka pengangguran karena diimbangi oleh penyediaan lowongan pekerjaan, dan meningkatnya jumlah perusahaan. Berdasarkan struktur umur dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,45 % pertahun maka penduduk usia produktif pada tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai 467.394 orang dari jumlah penduduk. Dengan demikian angka beban ekonomi masyarakat Muba pada tahun 2025 sebesar 150 % atau setiap tenaga kerja akan menanggung dirinya sendiri dan 1,50 jiwa lainnya.



Dengan demikian tantangan bidang ketenagakerjaan adalah perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang setiap tahun semakin meningkat.

Penduduk yang masuk dalam kelompok angkatan kerja di Kabupaten Musi Banyuasin terus bertambah, sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk, terutama penduduk yang masuk dalam angkatan kerja itu sendiri. Jumlah pencari kerja di kabupaten Musi Banyuasin pada bulan Desember tahun 2005 tercatat sebanyak 2.196 orang pencari kerja, yang terdiri dari 1.314 pencari kerja dari kelompok penduduk laki-laki dan 882 orang pencari kerja dari kelompok penduduk perempuan. Jumlah perusahaan pada tahun 2005 sebanyak 146 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 20.094. Jumlah perusahaan peserta jamsostek sebanyak 86 perusahaan dengan jumlah peserta jamsostek 14,175 orang. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan meningkat menjadi 156 dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 20.863 orang, yang kesemuanya sudah menjadi peserta jamsostek.

Sebagian penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin sudah ada yang bekerja, baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS), sebagai pegawai swasta, dan pekerjaan bidang lainnya. Penyerapan tenaga kerja ini sangat ditentukan oleh penyediaan lapangan kerja atau jumlah unit usaha yang ada di kabupaten Musi Banyuasin sendiri.

Dalam tiga (3) tahun terakhir penyerapan tenaga kerja di kabupaten Musi Banyuasin terlihat mengalami penurunan, hal ini terjadi, karena adanya pengurangan jumlah perusahaan. Dilihat daya serap tenaga kerja oleh perusahaan yang ada relative bertahan, seperti pada tahun 2005, walaupun terjadi penurunan jumlah perusahaan, namun daya serap tenaga kerja tetap bertahan.

Dalam mensikapi fenomena ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempertahankan perusahaan dan menjaga kondisi agar tetap kondusif. Berbagai faktor kemudahan harus benar-benar diperhatikan, termasuk kemudahan dalam administrasi, agar para investor atau para pengusaha tetap dapat bertahan dan berdatangan ke Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tabel 2.6.**  
**Jumlah Perusahaan dan Karyawan di Kab. Muba Tahun 2005**

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Karyawan
1	2000	279	36.314
2	2001	313	37.807
3	2002	356	47.945
4	2003	257	20.571
5	2004	293	20.519
6	2005	147	20.110

Sumber : Musi Banyuasin Dalam Angka, 2005

## 2.2.5 Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Sebagaimana halnya dengan kabupaten lain di propinsi Sumatera Selatan, sebagian besar penduduk Kabupaten Musi Banyuasin masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencahariannya. Dari jumlah 22.943 jiwa yang sudah bekerja, 15.330 jiwa berkecimpung pada sektor pertanian (3,27% dari jumlah penduduk). Kemudian diposisi kedua menyusul sektor jasa yang mampu menyerap 2.835 jiwa (0,61% dari jumlah penduduk), dan usaha dagang dengan menyerap 1.955 jiwa.

Dengan situasi lapangan pekerjaan/mata pencaharian tersebut, tentu akan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya, mengingat sebagian besar penduduk mengandalkan pencahariannya pada sektor pertanian yang mempunyai nilai tambah yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih dominannya tingkat kesejahteraan penduduk pada level Keluarga Sejahtera I (KS-I) yaitu sebesar 20,89% dan bahkan di level lebih rendah Pra Sejahtera sebanyak 21,28%.

Data dari BKBKS Kabupaten Musi Banyuasin bahwa pada tahun 2003 jumlah KK prasejahtera berjumlah 28.449 ( 27,9 %) dan KS I berjumlah 38.865 tahun 2004 jumlah KK prasejahtera berjumlah 27.143 ( 25,6 %) dan KS I berjumlah 39.787 KK , sedangkan untuk KS II , KS III , dan KS III plus tahun 2003 berjumlah 27.138, 7.744, dan 1.180. Dan di tahun 2004 KS II, KS III, dan KS III plus berjumlah 28.676, 8.811, dan 1.573 , sedangkan tahun 2006 menunjukkan penurunan Keluarga Pra sejahtera sebesar 12,91 % seperti pada tabel.

Tabel 2.7.

### Jumlah Keluarga dan Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin

	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Kel. Pra Sejahtera	31.274	28.449	27.143	-	19.842
	%	31,4 %	27,9 %	25,6 %	-	17,14 %
2	Kel. Sejahtera I	38.865	37.131	39.787	-	29.821
	%	38,9 %	36,5 %	37,5 %	-	25,76 %
3	Kel. Sejahtera II	21.685	27.138	28.676	-	35.692
	%	21,85%	26,7 %	27,1 %	-	30,83 %
4	Kel. Sejahtera III	6.688	7.744	8.811	-	16.387
	%	6,7 %	7,6 %	8,3 %	-	14,16 %
5	Kel. Sejahtera III Plus	1.191	1.180	1.573	-	3.577
	%	1,2 %	1,2 %	1,5 %	-	3,09 %
	<b>Jumlah</b>	<b>99.701</b>	<b>101.642</b>	<b>105.990</b>	-	<b>115.768</b>

Catatan : tahun 2005 tidak ada pendataan keluarga  
Sumber : BKBKS

### 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ada beberapa alat ukur atau indicator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia. Menurut BAPPENAS dan UNDP ukuran atau indikator kesejahteraan tersebut adalah, apabila terjadinya;

- 1) peningkatan pendapatan per kapita per tahun
- 2) menurunnya jumlah penduduk miskin
- 3) menurunnya jumlah pengangguran
- 4) meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM)
- 5) meningkatnya indeks pembangunan gender
- 6) meningkatnya indeks pemberdayaan gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan suatu ukuran atau indicator kualitas kehidupan manusia yang ditandai dengan ukuran-ukuran kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan lainnya, IPM atau HDI merupakan suatu ukuran atau indicator pembangunan manusia yang ditentukan oleh;

- 1) usia harapan hidup (*life expectancy*)
- 2) rata-rata anak di atas 15 tahun yang bersekolah (*adult literacy rate*)
- 3) rata-rata lama bersekolah (*mean years of schooling*)
- 4) kemampuan daya beli (*adjusted real per capita expenditure*) atau indeks pendapatan (*income index*).

Pada tahun 2004 yang lalu, IPM Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan urutan ke lima (5) dari empat belas (14) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk perbandingan tingkat nasional, IPM Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2004 berada pada urutan ke 215. Peringkat IPM yang telah dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, karena adanya peningkatan tolok ukur atau indikator penentu IPM itu sendiri.

**Tabel 2.8.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2004-2005**

Wilayah	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata2 Lama Sekolah	Daya Beli (ribuan)	IPM Th.2004	Ranking Prov	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata2 Lama Sekolah	Daya Beli (ribuan)	IPM Th.2005
Kota Palembang	69,5	97,4	9,5	616,5	73,1	1	69,9	97,7	9,7	616,8	73,6
Kota Prabumulih	68,5	97,5	8,3	596,8	70,7	2	70,0	97,7	8,3	597,1	71,1
Kota Pagaralam	68,7	96,9	7,9	591,2	69,5	3	69,2	97,2	8,0	591,5	69,9
Kab. OKU	68,0	94,8	6,9	610,2	69,3	4	68,8	95,1	7,0	610,5	69,9
<b>Kab. Muba</b>	<b>67,9</b>	<b>95,7</b>	<b>6,7</b>	<b>594,5</b>	<b>68,1</b>	<b>5</b>	<b>68,7</b>	<b>95,9</b>	<b>6,8</b>	<b>594,9</b>	<b>68,7</b>
Kab. M.Enim	65,8	98,8	7,2	595,5	68,1	6	66,6	98,6	7,3	596,4	68,7
Kab. OKI	66,0	94,3	6,6	612,8	68,1	7	66,9	94,7	6,7	613,2	68,8
Kab. OKU Selatan	68,0	93,5	6,7	597,8	67,9	8	68,9	93,7	6,9	599,6	68,8
Kab. Lahat	66,3	95,7	7,0	590,2	67,1	9	66,8	96,0	7,1	590,6	67,6
Kab. Banyuasin	66,1	93,4	7,0	593,6	66,7	10	68,7	93,5	7,0	595,4	67,2
Kota Lubuk Linggau	64,1	94,3	7,6	587,1	65,8	11	64,7	95,0	7,6	587,4	66,3
Kab. Ogan Ilir	64,4	93,8	6,5	594,7	65,6	12	65,4	94,2	6,6	595,0	66,3
Kab. OKU Timur	67,8	90,9	6,3	573,00	65,1	13	67,8	91,2	6,5	573,9	65,4
Kab. Musi Rawas	62,6	94,6	6,7	586,70	64,4	14	63,2	95,5	6,9	587,1	65,0
Sumatera Selatan	67,7	95,7	7,4	608,40	69,60	16/nas	68,6	90,9	7,5	610,3	70,4

Sumber : IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2005

### 2.2.7. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan pun merupakan faktor penentu kualitas Sumberdaya manusia (SDM). Semakin tinggi atau semakin baik atau semakin sehat SDM dan diikuti semakin tinggi tingkat dan kualitas pendidikan SDM, maka semakin tinggi kualitas SDM tersebut. Sebaliknya, walaupun SDM tersebut memiliki tingkat pendidikan tinggi, namun jika SDM tersebut tidak seha, bagaimana SDM tersebut akan bekerja, akan mengembangkan kreatifitasnya.

Dalam rangka mendukung kesehatan masyarakat pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan. Di Kabupaten Musi Banyuasin telah tersedia rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, dan tenaga media.

Pada tahun 2002 Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 610 tenaga kesehatan, kemudian meningkat menjadi 711 pada tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 559 dan turun kembali pada tahun 2005 menjadi 392 tenaga kesehatan, dengan rincian, seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9.**

**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya  
di Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2005**

No	Tahun	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Sanitarian	Lainnya	Jumlah
1	2002	22	2	189	116	38	243	610
2	2003	33	5	180	169	40	284	711
3	2004	29	3	182	241	39	65	559
4	2005	21	2	87	149	42	91	392

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, 2005

**2.2.8. Kemiskinan dan Desa Tertinggal**

Menurut data BPS tahun 2006 di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 32.678 Rumah tangga miskin atau 134.850 jiwa penduduk miskin. Jika dilihat dari penyebaran RT miskin ternyata Kecamatan Bayung Lencir dan Sungai Lilin mempunyai Jumlah rumah tangga miskin terbanyak yaitu 6.734 RT dan 4.957 RT. Dua Kecamatan ini merupakan daerah tujuan investasi baik sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti kehutanan, perkebunan karet, kelapa sawit serta migas kurang memberi kontribusi (*Multiplier effect*) kepada daerah atau masyarakat sekitar perusahaan. Adapun jumlah RT miskin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut,

**Tabel 2.10.**

**Jumlah Rumah Tangga Miskin  
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006**

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah ART
1	Sekayu	3.413	14.647
2	Babat Toman	2.342	8.612
3	Plakat Tinggi	1.329	5.180
4	Lais	3.956	16.593
5	Batang Hari leko	1.234	4.831
6	Sungai Lilin	4.957	21.228
7	Sanga Desa	1.659	7.720
8	Sungai Keruh	1.301	4.831
9	Keluang	938	3.391
10	Bayung Lencir	6.734	27.688
11	Lalan	4.815	19.531
	Jumlah	32.678	134.850

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006

Dari data diatas menjadi tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar lebih baik melalui menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses mayarakat miskin baik itu pendidikan, keschatan, infrastruktur dasar dan kebutuhan pangan, mengembangkan pembangunan berbasis masyarakat, dan memberikan bantuan dan pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selain aspek ekonomi, untuk desa-desa diperlukan juga percepatan pembangunan didaerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir, terpencil, keterbatasan Sumber daya alam, sumber daya manusia yang masih rendah, kurang berkembangnya kelembagaan adat, keterbatasan sarana dan prsarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya sehingga masyarakat di desa tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Dari 218 desa/kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 61 Desa tertinggal yang meliputi desa bantaran sungai, desa transmigrasi, daerah terisolir lainnya, 61 Desa tertinggal tersebut yaitu :

**Tabel 2.11.**  
**Jumlah Desa Tertinggal**  
**di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK
1	Sanga Desa	Jud I	741
		Tanjung Raya	875
		Keban I	1.255
2	Babat Toman	Tanjung Durian	895
		Napal	998
		Karang Ringin II	1.105
		Sugiwaras	976
		Sri Mulyo	717
		Sungai Angit	931
		Talang Piase	496
3	Batang Hari Leko	Pengaturan	628
		Pinggap	444
		Sungai Napal	753
		Pangkalan Bulian	1.658
		Lubuk Bintlalo	1.409
		Sako Suban	787
		Ulak Kembang	634
4	Plakat Tinggi	Bangun Harjo (SP6,8)	773
		Suka Maju (SP5,7)	1.016
		Sido Mukti (SP1,3)	1.744
		Bukit Indah (B3)	1.390
		Sialang Agung (CII)	868
		Warga Mulya (B4)	1.204
		Tanjung Kaputran (B5)	2.145
		Air Putih Ilir	928

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK
5	Sungai Keruh	Talang Mandung	1.044
		Sungai Dua	1.720
		Setia Jaya	2.285
		Kerta Jaya	4.444
		Mekar Jaya	1.897
6	Sekayu	Rimba Ukur	1.944
		Sungai Medak	1.056
		Sungai Balang (C.6)	1.092
7	Lais	Danau Cala	3.299
		Rantau Keroya	3.987
		Tanjung Agung Timur	2.903
		Tanjung Agung Utara	3.166
		Petaling	4.767
	Sungai Lilin	Langkap	1.777
		Tenggulang Jaya	599
		Bandar Tenggulang SP2	630
		Sumber Jaya	833
		Tanggulang Baru SP5	1.165
9	Keluang	Tenggaro	926
		Dawas	4.092
		Tanjung Dalam	904
10	Bayung Lencir	Mangsang	4.250
		Suka Damai	4.634
		Pulai Gading	3.419
		Muara Medak	2.726
		Mendis	2.745
		Pangkalan Bayat	1.011
		Pagar Desa	799
11	Lalan	Perumpung Raya	1.135
		Karang Sari/Madya Mulya	1.034
		Purwa Agung	1.227
		Ringin Agung UPT XX III	1.267
		Mekar Sari UPT XX P.8	627
		KA	1.034
		Karang sari P4	1.454
		Sari Agung	1.187
		Bumi Agung	
Jumlah		61	

Sumber : BPS dan Bagian Tata Pemerintahan Kab. Muba

## 2.3 PEREKONOMIAN WILAYAH

### 2.3.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin

Kondisi perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang terus meningkat. Kondisi pada tahun 2000 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 8.887.890 milyar, pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 9.508.363 juta dan pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 16.962.398 juta. Begitu juga dengan PDRB dengan migas telah meningkat sebesar 2,87 % yaitu dari Rp. 9.696.003 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 9.982.326 juta pada tahun 2005.

Perkembangan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.12**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Musi Banyuasin**  
**Tahun 2000 – 2005 (Juta Rupiah)**

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2000	8.887.890	2.504.138	8.887.890	2.504.138
2001	9.508.363	2.861.518	9.050.413	2.627.720
2002	8.795.101	3.216.042	9.242.810	2.762.313
2003	9.950.943	3.585.088	9.516.107	2.934.514
2004	12.046.457	4.206.525	9.696.003	3.146.002
2005	16.962.398	5.032.206	9.982.326	3.398.920

Sumber Th. 2000 - 2005: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kab. Muba. 2006

Secara keseluruhan selama periode 2000 - 2005, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin baik dengan migas maupun tanpa migas menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 1,42 % (dengan migas) dan 4,08 % (tanpa migas) meningkat menjadi 4,13 % (dengan migas) dan 6,43 % (tanpa migas) di tahun 2002. Tren positif tersebut terus berlanjut dimana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 5,44 % (dengan migas) dan 7,38 % (tanpa migas). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah ini

**Tabel 2.13**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Tahun 2000 – 2005**

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
2000	1,42	4,08
2001	1,83	4,90
2002	4,13	6,43
2003	4,54	6,55
2004 <sup>e</sup>	5,34	7,26
2005	5,44	7,38

Sumber Th. 2000 - 2004 : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kab. Muba. 2004.  
 Sumber Th. 2005 : Data Diolah ; karena Data PDRB 2005 belum dipublikasikan BPS

Dari tabel 2.13 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih tinggi dari dengan migas. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan sektor pertambangan migas relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.



Kenyataan ini menunjukkan bahwa dimasa mendatang atau dua puluh tahun kedepan sektor migas tidak dapat lagi dijadikan andalan utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Pada tabel 2.14. terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode 2002 – 2005 didukung oleh tingginya pertumbuhan sektor primer yaitu sektor pertanian yang mencapai 6,81% (2002), 7,64% (2003), 8,66% (2004) dan 12,25 (2005) disusul oleh sektor tersier yaitu sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Pesatnya pertumbuhan di pertanian ini erat kaitannya dengan pesatnya pembangunan di sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan pertumbuhan sektor pertambangan paling rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin periode 2002 - 2005 ini didukung oleh satu sektor primer yaitu pertanian, dan dua sektor sekunder yaitu sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

**Tabel 2.14**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2005 (dalam persen)**

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	6,81	7,64	8,66	12,25
2. Pertambangan	1,06	1,71	2,52	1,18
3. Industri	7,55	5,87	6,07	2,04
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	12,11	14,40	14,85	11,21
5. Bangunan	7,20	8,65	10,26	7,85
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,09	6,61	7,25	9,39
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,74	5,27	5,70	10,90
8. Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	3,94	3,71	4,06	5,25
9. Jasa-jasa	3,17	3,83	4,30	8,01
PDRB dengan Migas	4,13	4,54	5,34	5,44
PDRB tanpa Migas	6,43	6,55	7,26	7,38

Sumber Th. 2000 - 2004 : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kab. Muba. 2005

Nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2005 Atas Dasar Harga Berlaku dengan migas adalah sebesar Rp. 16.962.398,- juta, nilai ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan migas tahun 2004 yang hanya mencapai Rp. 12.046.457 Juta.

Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tanpa migas pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 5.032.206,- juta. Nilai ini mengalami peningkatan jika dibanding

dengan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku tanpa migas Tahun 2004 yang hanya mencapai Rp 4.206.525,- juta. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas dasar Harga Berlaku, baik dengan migas maupun tanpa migas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel .2.15**  
**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2002-2005**

(juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2002 <sup>1)</sup>	2003	2004	2005
1	Pertanian	1.232.982	1.395.037	1.681.176	1.990.997
2	Pertambangan dan Penggalian	5.679.209	6.475.063	7.958.460	12.060.858
3	Industri pengolahan	725.956	789.554	860.344	968.690
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.474	3.429	3.901	4.700
5	Bangunan	259.704	324.709	415.985	540.045
6	Perdagangan, Hotel & Rest	499.686	542.951	591.967	687.547
7	Pengangkutan & Komunikasi	19.362	22.567	29.812	38.469
8	Keuangan, Persewaan & J.P	113.021	122.014	135.695	150.050
9	Jasa-Jasa	262.707	275.618	369.117	520.942
	<b>PDRB dengan Migas</b>	<b>8.795.101</b>	<b>9.950.943</b>	<b>12.046.457</b>	<b>16.962.398</b>
	<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>3.216.042</b>	<b>3.585.088</b>	<b>4.206.525</b>	<b>5.032.206</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 2005 dan Muba Dalam Angka Tahun 2005

Kemudian nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 8.887.890,- juta. Dibandingkan dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas pada tahun 2004 mengalami peningkatan, yang hanya mencapai Rp 9.696.003,- juta. Begitu juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 tanpa migas, pada tahun 2005 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 menunjukkan nilai sebesar Rp. 3.398.920,- juta. Dibandingkan dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 tanpa migas pada tahun 2004 mengalami peningkatan, yang hanya mencapai Rp. 3.146.002,- juta. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 ini sama halnya dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat.

**Tabel 2.16.**  
**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004**

(juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2002 <sup>1)</sup>	2003	2004	2005
1	Pertanian	1.020.607	1.092.064	1.179.040	1.283.102
2	Pertambangan dan Penggalian	6.562.092	6.667.651	6.638.700	6.674.845
3	Industri pengolahan	621.667	645.834	677.647	715.797
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.632	1.765	1.919	2.102
5	Bangunan	229.37	253.540	286.906	326.901
6	Perdagangan, Hotel & Rest	478.091	509.671	546.613	589.321
7	Pengangkutan & Komunikasi	16.130	17.244	19.434	22.448
8	Keuangan, Persewaan & J.P	96.707	100.704	105.170	110.834
9	Jasa-Jasa	216.747	227.634	240.347	256.966
	<b>PDRB dengan Migas</b>	<b>9.242.810</b>	<b>9.516.107</b>	<b>9.969.003</b>	<b>9.982.326</b>
	<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>2.762.313</b>	<b>2.934.514</b>	<b>3.146.002</b>	<b>3.398.920</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 2004 dan Muba Dalam Angka Tahun 2005

### 2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas pada tahun 2005 adalah sebesar 2.95 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Atas dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas pada tahun 2004, mengalami penurunan, yang mencapai 4.71 persen. Pertumbuhan ekonomi Atas Dasar harga Konstan tahun 2000 tanpa migas pun demikian, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 tanpa migas adalah sebesar 8.04 persen, mengalami penurunan, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Atas dasar Harga Kosntan tahun 2000 tanpa migas tahun 2004 yang mencapai 8.17 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas dan tanpa migas beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin  
Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004**  
(persentase)

No.	Lapangan Usaha	2002 <sup>r)</sup>	2003	2004	2005
1	Pertanian	5.58	6.96	8.04	8.83
2	Pertambangan dan Penggalian	0.82	1.61	3.20	0.54
3	Industri pengolahan	5.42	6.66	5.18	5.03
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7.51	8.15	8.73	9.54
5	Bangunan	7.20	10.65	13.16	13.94
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6.09	6.61	7.25	7.78
7	Pengangkutan & Komunikasi	5.91	6.91	12.70	16.61
8	Keuangan, Persewaan & J.P	3.48	4.13	4.43	5.39
9	Jasa-Jasa	3.33	.91	16.69	6.21
	<b>PDRB deangan Migas</b>	<b>2.14</b>	<b>2.85</b>	<b>4.71</b>	<b>2.95</b>
	<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>5.15</b>	<b>5.86</b>	<b>8.17</b>	<b>8.04</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 2004 dan Muba Dalam Angka Tahun 2005

Keterangan : r) = angka revisi

### 2.3.3 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat dilihat dari berbagai tinjauan. Dalam perekonomian Indonesia, struktur ekonomi dapat dibagi dalam empat tinjauan, yaitu secara makro sektoral (agraris, industri, atau perdagangan), secara keruangan (pedesaan/tradisional dan perkotaan/modern), berdasarkan pengambil keputusan (sentralistik dan desentralisasi) dan secara politik ekonomis (estetis, kapitalis, egaliter). Umumnya, untuk melihat struktur ekonomi digunakan pendekatan secara makro sektoral.

Struktur ekonomi dapat menggambarkan kemajuan suatu daerah. Semakin maju perekonomian suatu daerah, maka kontribusi sektor primer cenderung mengalami penurunan sedangkan sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Secara makro sektoral (berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Atas dasar Harga Konstan tahun 2000 ), dengan migas, maka struktur ekonmi Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatagorikan sebagai perekonomian yang masih bersifat agraris, karena kontribusi sektor industri dan atau sektor perdagangan masih lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian. Dengan kata lain, sektor pertanian masih memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan atau perdagangan. atau sektor lain.

Tabel 2.18.

**Struktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin  
Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan (Dengan Migas)**  
(persentase)

No.	Lapangan Usaha	2002 <sup>r)</sup>	2003	2004	2005
1	Pertanian	11.04	11.48	10.84	12.87
2	Pertambangan dan Penggalian	70.92	70.06	69.06	66.86
3	Industri pengolahan	6.72	6.97	7.00	7.17
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.02	0.02	0.02	0.02
5	Bangunan	2.48	2.66	2.83	3.26
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5.17	5.36	5.49	5.90
7	Pengangkutan & Komunikasi	0.17	0.18	0.20	0.24
8	Keuangan, Persewaan & J.P	1.05	1.06	1.06	1.10
9	Jasa-Jasa	2.46	.21	2.47	2.57
	<b>J u m l a h</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 2004 dan Muba Dalam Angka Tahun 2005  
Keterangan : r) = angka revisi

Hal ini akan lebih jelas, bila dilihat dari aspek makro sektoral (berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar harga Konstan) tanpa migas, maka struktur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin jelas dapat dikategorikan sebagai perekonomian yang bersifat agraris. Struktur ekonomi agraris ini terlihat pada kontribusi sektor pertanian yang memberikan nilai tambah terbesar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dari tahun ke tahun.

Tabel 2.19

**Struktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin  
Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan tanpa Migas**  
(persentase)

No.	Lapangan Usaha	2002 <sup>r)</sup>	2003	2004	2005
1	Pertanian	36.83	37.22	37.17	37.50
2	Pertambangan dan Penggalian	2.94	2.93	2.88	2.85
3	Industri pengolahan	22.42	22.59	21.97	21.05
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.06	0.06	0.06	0.06
5	Bangunan	8.26	8.64	9.04	9.61
6	Perdagangan, Hotel & restoran	17.24	17.37	17.22	17.33
7	Pengangkutan & Komunikasi	0.58	0.59	0.61	0.66
8	Keuangan, Persewaan & J.P	3.49	3.43	3.31	3.25
9	Jasa-Jasa	8.16	7.18	7.74	7.69
	<b>J u m l a h</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 2004 dan Muba Dalam Angka Tahun 2005  
Keterangan : r) = angka revisi

### 2.3.4 Pendapatan Per kapita

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan produksi atau tingkat pendapatan secara makro, tetapi pertumbuhan ekonomi dapat juga menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk akan bisa dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan per kapita.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas, pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 17.673.883,- kemudian meningkat menjadi Rp 18.038.168,- pada tahun 2004. Begitu juga dengan pendapatan per kapita tanpa migas, dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan.

**Tabel 2.20**  
**Pendapatan Per kapita Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Atas dasar harga Konstan**  
(Dalam Rupiah)

No.	Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
1	2000	17.513.941	4.916.560
2	2001	17.484.142	5.070.155
3	2002	17.496.160	5.223.289
4	2003	17.673.883	5.430.972
5	2004	18.038.168	5.726.471
6	2005	-	-

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Musi Banyuasin 2005

**Tabel 2.21**  
**Pendapatan Per kapita Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Atas dasar harga Berlaku**  
(Dalam Rupiah)

No.	Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
1	2000	17.513.941	4.934.504
2	2001	18.856.941	5.526.599
3	2002	19.197.234	6.106.491
4	2003	20.828.516	6.697.403
5	2004	24.659.757	7.664.042
6	2005	-	-

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Musi Banyuasin 2005

Hal yang sama terjadi pula dengan pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas dasar Harga Berlaku, baik dengan migas maupun tanpa migas. Pada tahun 2003 pendapatan per kapita masyarakat dengan migas sebesar Rp.20.828.516,-

kemudian meningkat menjadi Rp 24.659.757,- pada tahun 2004. Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin tersebut menunjukkan trend yang terus meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat tersebut, tak terlepas dari peningkatan dari nilai atau hasil pembentukan PDRB dari tahun ke tahun, walaupun jumlah penduduk juga mengalami peningkatan, namun nilai atau hasil pembentukan PDRB pun mengalami peningkatan bahkan persentase peningkatannya lebih besar dibandingkan persentase peningkatan jumlah penduduk.

Nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2005 Atas Dasar Harga Berlaku dengan migas adalah sebesar Rp. 16.962.368,- juta, nilai ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan migas tahun 2004 yang hanya mencapai Rp. 13.622.319 Juta.

Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tanpa migas pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 5.032.206,- juta. Nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku tanpa migas Tahun 2004 yang hanya mencapai Rp 4.233.700,- Juta. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas dasar Harga Berlaku, baik dengan migas maupun tanpa migas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel .2.22**  
**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2002-2005**

(juta rupiah)					
No.	Lapangan Usaha	2002 <sup>r)</sup>	2003	2004	2005
1	Pertanian	1.233.731	1.395.411	1.682.735	1.990.997
2	Pertambangan dan Penggalian	7.023.265	7.718.187	9.510.886	12.060.858
3	Industri pengolahan	725.957	810.147	881.841	968.690
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.474	3.428	3.902	4.700
5	Bangunan	259.704	324.709	415.985	540.045
6	Perdagangan, Hotel & Rest	499.70	542.709	592.053	687.547
7	Pengangkutan & Komunikasi	19.499	22.743	29.812	38.469
8	Keuangan, Persewaan & J.P	113.021	122.014	135.988	150.050
9	Jasa-Jasa	275.217	275.617	369.118	520.945
	<b>PDRB dengan Migas</b>	<b>10.152.568</b>	<b>11.215.235</b>	<b>13.622.319</b>	<b>16.962.398</b>
	<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>3.229.453</b>	<b>3.606.255</b>	<b>4.233.700</b>	<b>5.032.206</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 2004 dan Muba Dalam Angka Tahun 2005

Keterangan : r) = angka revisi

$$\hat{Y}_i = a + bX_i$$

Y = nilai prediksi PDRB sektor i.  
a = konstanta  
b = pertumbuhan (koefisien trend)  
X = periode waktu / (1997=0)

Dari hasil prediksi tersebut kemudian dikaji/dianalisis potensi strategisnya, dengan menggunakan 4 indikator, yaitu ;

1. Nilai **Location Quotient (LQ)** sektor, untuk mengetahui apakah sektor tersebut termasuk *sektor basis* atau *non basis*, dengan rumus sebagai berikut (*hasil perhitungan terlampir*):

$$LQ = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n}$$

X<sub>r</sub> = nilai produksi sub-sektor i Kabupaten Muba  
RV<sub>r</sub> = nilai total PDRB Kabupaten Muba  
X<sub>n</sub> = nilai produksi sub-sektor i Sumsel  
RV<sub>n</sub> = nilai total PDRB Sumsel

2. Ranking PDRB sektor pada tahun yang di analisis.
3. Trend kontribusi sektor selama periode analisis dengan klasifikasi turun/naik.
4. Trend nilai LQ sektor selama periode analisis dengan klasifikasi turun/naik.

Dengan kriteria tersebut maka dapat digambarkan posisi setiap Sektor Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

### 1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian secara umum merupakan sektor non basis dengan nilai LQ yang cenderung menurun. Namun dengan kontribusi kedua terbesar (19,43%) dengan trend yang terus meningkat selama 2003-2025, maka sektor ini masih cukup potensial untuk dikembangkan.

Dari 5 sub-sektor dibidang pertanian dapat dijelaskan masing-masing berdasarkan potensi perkembangannya. Subsektor perkebunan adalah sub-sektor yang cukup potensial untuk tumbuh dengan baik dimasa datang. Karena meskipun bukan termasuk basis, kontribusi pada PDRB adalah terbesar untuk sektor pertanian (keempat dari semua sub-sektor (8,76%). Selain itu trend kontribusinya terus menaik selama masa analisis.

Demikian juga halnya dengan sub-sektor tanaman pangan (yang bukan basis dengan trend LQ-nya konstan), peluang berkembangnya masih cukup besar.



Ini terlihat dari kontribusinya diposisi kelima dari semua sub-sektor (5,22%) dan kedua disektor pertanian, dan kondisi ini cenderung terus meningkat diwaktu mendatang.

Sub-sektor lainnya yang berpotensi untuk berkembang baik disektor pertanian adalah sub-sektor kehutanan. Karena selain termasuk sektor basis, juga kontribusinya diurutan ke-6 dari semua sub-sektor (ke-3 disektor pertanian dengan 3,65%).

Sedangkan dua sub-sektor lainnya yaitu sub-sektor perikanan dan peternakan terlihat kurang potensial (terutama peternakan), karena selain kontribusinya yang relative kecil (dibawah 2%) juga termasuk non basis dengan LQ yang cenderung menurun. Namun harapan untuk tumbuh kedepan masih ada pada perikanan, karena selain basis juga trend LQ-nya menaik, meskipun ranking kontribusi PDRB-nya mempunyai peluang menurun.

Untuk itu secara umum dapat dijelaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan Kabupaten Muba kedepan dan potensial terus berkembang, karena meskipun bukan sektor basis, namun kontribusinya pada perekonomian daerah berada pada posisi terbesar kedua dan cenderung terus meningkat.

## **2. Sektor Pertambangan & Penggalian**

Sektor ini merupakan sektor basis dengan nilai LQ yang terus meningkat sampai 25 tahun kedepan. Dengan kontribusi terbesar (54,03%) dan cenderung makin menaik, maka perannya sangat dominan terhadap perekonomian daerah. Sehingga sektor ini merupakan sektor yang paling potensial untuk tumbuh dan berkembang dimasa datang.

Saat ini sektor pertambangan dan penggalian ini hanya memperhitungkan 2 sub-sektor yaitu sub-sektor migas dan penggalian. Namun yang dominan adalah sub-sektor migas dengan kontribusi 51,57% (ranking pertama dari semua sub-sektor), dan terus meningkat selama 2003-2025. Sedangkan untuk sub-sektor penggalian, meskipun ranking kontribusinya diposisi 7 (2,48%) dari semua sub-sektor, potensi pertumbuhan cukup bagus kedepan. Karena disamping termasuk sektor basis, juga trend kontribusinya terus naik.

Oleh karena itu potensi perkembangan sektor pertambangan dan penggalian masih sangat tinggi, dan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Muba sampai 25 tahun kedepan. Hal ini didukung oleh besarnya kontribusi serta posisi sebagai sub-sektor basis, dimana kedua tolok ukur tersebut cenderung terus meningkat.

### **3. Sektor Industri Pengolahan**

Sektor industri pengolahan sementara ini hanya mengandalkan industri tanpa migas, dengan kontribusi sebesar 11,43% dan menempati posisi ke-3 sumbangannya terhadap perekonomian daerah. Disamping itu sub-sektor industri tanpa migas ini merupakan sektor basis dengan nilai LQ yang makin menaik.

Oleh karena itu dengan kondisi seperti diatas disamping termasuk sektor basis, dengan trend nilai LQ yang terus naik dan dengan posisi kontribusi yang cukup besar, maka sektor ini masih punya peluang potensial untuk terus berkembang. Meskipun terlihat kecenderungan trend kontribusinya menurun, namun penurunannya relative kecil bahkan cenderung keposisi konstan.

### **4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih**

Sektor yang satu ini merupakan sektor yang paling kurang populer di Kabupaten Muba. Karena selain mengalami pertumbuhan yang relatif lambat, juga pengaruhnya terhadap perekonomian sangat kecil sekali yaitu 0,11% (posisi ke-17/terakhir).

Atas dasar gambaran tersebut, maka untuk kedepan sektor ini tidak banyak memberikan harapan untuk menyumbang secara signifikan terhadap ekonomi daerah, karena selain bukan termasuk sektor basis, juga kontribusinya yang sangat rendah, meskipun terlihat trend kontribusi dan trend nilai LQ yang terus meningkat.

### **5. Sektor Bangunan**

Perkembangan sektor bangunan sedikit lebih moderat dibandingkan dengan sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor ini menempati ranking ke-10 (1,31%) kontribusinya terhadap perekonomian daerah, dengan kecenderungan terus menurun dimasa mendatang. Sektor ini akan menjadi basis di tahun 2020 (meskipun pada awalnya termasuk non basis). Nilai basisnya cenderung meningkat sampai tahun tersebut.

Dengan gambaran diatas sektor ini kurang dapat diandalkan untuk berkontribusi banyak terhadap perekonomian Musi Banyuasin, karena selain kontribusi yang rendah dengan kecenderungan terus menurun kedepan, juga nilai basisnya mengalami stagnan selama masa analisis.

## **6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran**

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran selama masa analisis mempunyai kondisi yang cukup baik. Dengan sumbangan sebesar 14,61% (menempati posisi ketiga setelah pertambangan/penggalian dan pertanian), sektor ini masih dapat diandalkan. Meski bukan termasuk sektor basis, namun dengan kontribusinya yang cukup besar, maka perlu dukungan untuk mengembangkan potensinya.

Sektor ini sementara ini masih didominasi oleh sub-sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 14,38,% (urutan ke-2 dari semua sub-sektor). Meskipun terjadi penurunan selama periode analisis, tapi penurunannya cukup kecil bahkan cenderung konstan. Sedangkan untuk sub-sektor restoran tidak dapat diandalkan potensinya, karena selain kontribusinya yang kecil (0,16%) dan cenderung menurun, juga tidak termasuk basis. Demikian juga dengan sub-sektor hotel yang kontribusinya sangat kecil sekitar 0,06%, potensinya sangat rendah.

## **7. Sektor Pengangkutan & Komunikasi**

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi juga termasuk dalam katagori sektor yang rendah potensinya. Selain bukan merupakan sektor basis, juga kontribusinya sangat rendah (0,60%) terhadap perekonomian daerah sehingga berada diposisi ke-8 dari sembilan sektor.

Demikian juga dengan kondisi sub-sektornya yaitu pengangkutan dan komunikasi, kontribusinya relatif rendah karena berada pada posisi 14 dan 16 dari semua sub-sektor dengan sumbangan sekitar 0,51% dan 0,11%. Meskipun sub-sektor pengangkutan mempunyai trend kontribusi dan nilai LQ yang naik, namun karena peran yang rendah maka tidak dapat diandalkan untuk mendukung perekonomian secara umum.

## **8. Sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan**

Sektor yang satu ini berada pada posisi ke-6 dalam sumbangannya terhadap perekonomian kabupaten Muba dengan kontribusi sebesar 1,61%, namun secara keseluruhan sub-sektor ini menduduki posisi ke-9. Selain itu sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan termasuk sektor basis meskipun nilai basisnya mengalami stagnan.

Oleh karena itu dilihat dari segi potensi, memberikan gambaran kurang begitu prospektif untuk kedepan. Namun untuk mendukung roda perekonomian secara

makro, sektor ini harus dikembangkan dan perlu didukung pertumbuhannya oleh pemerintah daerah.

## 9. Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa dengan sumbangan sebesar 2,89% menempati posisi ke-5 dari sembilan sektor ekonomi. Meskipun bukan termasuk sektor basis, masih ada harapan untuk dikembangkan.

Kalau dilihat dari kondisi sub-sektornya yaitu sub-sektor jasa pemerintah dan jasa swasta, tercermin bahwa sub-sektor jasa pemerintah lebih punya prospek. Karena selain menempati posisi ke-8 dari semua sub-sektor, juga trend nilai LQ-nya cenderung meningkat selama masa analisis.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor ini relatif kecil kontribusinya terhadap perekonomian daerah, namun karena sifatnya banyak terkait masalah pelayanan dalam upaya mendukung lancarnya roda perekonomian secara *agregat*, maka sudah semestinya sektor ini mendapat perhatian untuk tetap dikembangkan untuk masa kedepan.

### 2.3.6 Potensi Sektor/Subsektor Strategis 2005-2025

Dengan gambaran posisi potensi ekonomi yang ada maka dapat diklasifikasikan sektor/subsektor yang diproyeksikan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dan mempunyai *multiplier effect* besar terhadap pembangunan daerah, sehingga merupakan sektor prioritas untuk dikembangkan dalam masa perencanaan (2005-2025) sebagai berikut:

#### 1. Pertambangan dan penggalian

**Subsektor minyak dan gas** merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB, dan juga sebagai sektor basis. Namun perlu diantisipasi bahwa potensi ini untuk jangka panjang akan makin berkurang, karena sifatnya yang *non renewable* (tidak dapat diperbarui). Untuk mempertahankan sektor pertambangan ini sebagai sektor unggulan, potensi-potensi lain yang selama ini belum digarap optimal perlu digali dan lebih ditingkatkan pengelolaannya. Potensi-potensi dimaksud antaranya

- a. **Minyak** : potensi yang belum diproduksi 3.700 MSTB,
- b. **gas alam** : potensi yang belum diproduksi 2.410.607 BSCF,
- c. **kondensat** : potensi yang belum diproduksi 11.737 MSTB,
- d. **batubara** : potensi yang belum diproduksi 3,395 MT,
- e. **kaolin** : potensi yang belum diproduksi 10 juta ton dll.

Dari segi potensi, daerah Musi Banyuasin mempunyai *kekuatan* untuk mengembangkan sektor pertambangan dan penggalian ini sebagai basis perekonomian daerah, mengingat potensi tambang yang dimiliki cukup besar.

Namun *kendala* yang dihadapi berkaitan dengan potensi tersebut adalah keterbatasan SDM dan modal untuk mengelolanya. Untuk itu pengembangan SDM dan mengundang investor merupakan salah satu alternatif yang mendesak untuk dilakukan saat ini.

Dengan kondisi tersebut *Peluang* untuk pengembangan potensi ini masih cukup besar, mengingat kebutuhan energi dunia masih dominan berasal dari bahan tambang (migas, batubara).

Sedangkan *ancamannya* dari aspek bisnis adalah cukup kecil mengingat belum optimalnya penemuan energi pengganti kebutuhan masyarakat. Dan ancaman yang paling memungkinkan justru terkait dengan masalah kerusakan lingkungan, jika eksplorasinya tidak dilakukan dengan baik, disamping potensi ini bersifat *non renewable* (tidak dapat diperbarui).

Schubungan dengan itu maka pengelolaan potensi tambang ini kedepan dilakukan dengan lebih optimal melalui :

- 1) peningkatan eksplorasi dalam rangka meningkatkan produksi,
- 2) peningkatan eksploitasi yang selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan,
- 3) peningkatan manfaat pertambangan dan nilai tambah, dan
- 4) mengevaluasi aturan kebijakan yang tidak sesuai.

Semua upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan energi dan sumber daya mineral tersebut mampu memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

## 2. Pertanian

**Subsektor perkebunan** merupakan andalan dari sektor ini. Dengan daya dukung alam dan luas areal 361.000 Ha (178.000 Ha perkebunan yang dikelola rakyat dan 183.000 Ha perkebunan swasta), maka subsektor ini kedepan akan menjadi andalan perekonomian daerah. Saat ini kontribusinya menempati posisi ke-4 terhadap perekonomian daerah dan cenderung terus meningkat.

**Subsektor tanaman pangan** merupakan subsektor kedua yang menjadi andalan sektor pertanian. Meskipun kontribusinya terhadap perekonomian daerah saat ini diposisi kelima, namun mengingat sebagian besar penduduk (diatas 15%) mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, dan potensi lahan seluas 265.310,67 ha, maka subsektor ini cukup strategis untuk terus dikembangkan. Potensi lahan untuk ekstensifikasi pertanian juga masih sangat memungkinkan didaerah Musi Banyuasin.

**Subsektor kehutanan** adalah potensi lain yang dapat menjadi andalan dari sektor pertanian. Dengan luas lahan 440.306 Ha, maka potensi alam ini sangat mendukung untuk pengembangan subsektor ini di Musi Banyuasin. Dan dalam rangka perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, maka pengembangannya diarahkan dapat bersinergi dengan sektor industri dalam rangka pengembangan hutan tanaman industri. Saat ini subsektor ini sudah termasuk sektor basis.

Dengan potensi di atas, maka hal tersebut merupakan sisi lain *kekuatan* daerah Musi Banyuasin untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai basis perekonomian daerah.

Namun untuk mengoptimalkan pengelolaannya nampaknya faktor keterbatasan SDM dan modal tetap menjadi *kendala* saat ini. Selain itu makin berkurangnya areal pertanian akibat alih fungsi lahan yang terus meningkat. Oleh karena itu, pengembangan SDM dan melibatkan pihak swasta tetap menjadi alternatif kegiatan kedepan untuk dilakukan.

Secara eksternal pengembangan potensi pertanian ini juga masih punya *peluang* besar. Hal ini terkait dengan kebutuhan masyarakat akan produk-produk pertanian (pangan, sandang, papan) yang terus meningkat. Sehingga prospek untuk menjadi andalan perekonomian daerah masih sangat besar.

Dari segi *ancaman* sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan, karena pasar untuk komoditas pertanian masih cukup luas. Kalaupun ada mungkin terbatas pada hasil karet alam yang mengalami persaingan dari karet sintetis.

Ancaman yang lebih mengkhawatirkan justru jika pengelolaannya (terutama hutan) tidak profesional akan menimbulkan kerusakan lingkungan (erosi, banjir dll) yang akan membawa malapetaka pada masyarakat itu sendiri.

Dengan situasi dan potensi di atas maka kebijakan pengembangan sektor pertanian dilakukan dengan ;

- 1) pengembangan luas areal padi tadah hujan dan pengoptimalan pengembangan padi pasang surut,
- 2) pengembangan kelapa sawit rakyat dengan pola kemitraan,
- 3) pengembangan dan peningkatan produksi tanaman karet,
- 4) memperbaiki sistem pengelolaan kawasan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan,
- 5) mengaktifkan sumberdaya yang tersedia dalam pengelolaan hutan,
- 6) peningkatan kemampuan SDM pertanian secara umum.

### 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Subsektor perdagangan menjadi andalan sektor yang satu ini. Meskipun bukan termasuk sektor basis, namun perannya cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Subsektor ini cukup banyak melibatkan masyarakat kecil/menengah, dan hal ini terlihat dari besarnya kontribusinya terhadap PDRB yang menempati posisi ke-2 setelah migas.

Posisi daerah Musi Banyuasin yang berada pada posisi sentral yang diapit oleh 3 kabupaten lain (Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas) dan berbatasan langsung dengan propinsi Jambi, merupakan *kekuatan* untuk mengembangkan sektor perdagangan ini kedepan.

Disisi lain aspek jalan dan akses transportasi yang terbatas merupakan *kendala* untuk memanfaatkan posisi strategis tersebut. Oleh karena itu akses jalan, jalur transportasi dan moda transportasi baru (jalur KA dan pesawat udara) harus secepatnya diupayakan untuk dapat menangkap peluang tersebut.

Kondisi dan posisi daerah seperti di atas menjadi *Peluang* yang potensial untuk pengembangan sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) kedepan.

Terkait dengan hal tersebut tentu akan timbul *ancaman* juga jika daerah lain melakukan hal yang sama. Namun hal tersebut dapat diminimalisasi bila hubungan antar daerah dapat bersinergi dalam perdagangan dan tentunya hal ini

bisa lebih menguntungkan daerah Musi Banyuasin jika lebih awal/dulu mempersiapkan diri.

Untuk itu arah kebijakan pembangunan sektor ini kedepan adalah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung seperti pasar, pusat pertokoan, sarana jalan penghubung, transportasi dan telekomunikasi.

#### 4. **Industri**

Dari sektor ini penekanannya lebih pada pengembangan **subsektor industri tanpa migas**. Subsektor ini punya potensi cukup prospektif. Hal ini terlihat dari kontribusinya yang cukup signifikan terhadap PDRB (urutan ke-3). Disamping itu nilai LQ-nya cenderung terus meningkat, sehingga diproyeksikan dapat menjadi sektor basis mulai tahun 2015.

Dengan daya dukung alam yang ada, merupakan *kekuatan* bagi daerah Musi Banyuasin untuk mengembangkan sektor industri, terutama industri kecil dan menengah. Karena itu industri yang punya peluang dikembangkan adalah industri yang berbasis pertanian dan hasil tambang, mengingat potensi pertanian dan tambang yang dimiliki cukup besar.

Terkait dengan hal tersebut, nampaknya *kendala* yang dihadapi adalah masih terbatasnya tenaga terampil yang akan berkecimpung dan untuk menangani usaha industri ini. Untuk itu pengembangan SDM dan pemberian insentif usaha merupakan salah satu alternatif yang mendesak untuk dilakukan.

Sedangkan dari sisi *peluang*, masih cukup terbuka untuk pengembangan sektor ini, mengingat potensi pasar yang cukup luas, baik di dalam daerah maupun daerah sekitarnya.

Dari segi *ancaman* terutama dari usaha sejenis, nampaknya tidak terlalu mengancam jika produknya dikemas dengan mutu dan disain yang khas dengan orientasi pasar tidak terbatas didalam daerah, tapi juga keluar (ekspor).

Atas dasar potensi yang ada, maka arah pengembangan sektor industri untuk jangka panjang adalah :

- 1) mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing.
- 2) mengembangkan industri yang berbasis pertanian (agroindustri) dan banyak menyerap tenaga kerja, seperti industri makanan dan minuman, industri pengolah hasil perikanan, industri karet dan barang karet dan lainnya.



## 5. Jasa-jasa

Untuk saat ini dari sektor jasa masih dominan pada subsektor jasa pemerintah. Sebagai stimulus pembangunan daerah, maka peran jasa pemerintah meski terus dipacu untuk masa-masa mendatang, baik dari kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Saat ini subsektor ini berada pada posisi ke-8 kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah, selain jasa sektor pemerintah, harus didukung pula pertumbuhan jasa sektor swasta. Dengan demikian kebutuhan-kebutuhan usaha jasa oleh masyarakat lebih mudah dapat diakses sehingga akan mendorong dan lebih mempercepat akselerasi pembangunan secara keseluruhan.

### 2.3.7 Potensi Sektor/Subsektor Strategis Selama 4 Periode (Periode 5 Tahunan)

Dengan gambaran analisis potensi di atas, secara rinci prioritas pengembangan sektor/subsektor tersebut dapat disusun untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai berikut:

#### Periode I (2005-2010)

Untuk lima tahun pertama, urutan potensi sektor/sub-sektor yang diprediksi memberikan kontribusi yang cukup signifikan serta memberikan daya dorong bagi pertumbuhan sektor/sub sektor lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Pertambangan dan penggalan, khususnya pada subsektor minyak dan gas. Subsektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB, disamping sebagai sektor basis. Sehingga sub sektor ini memiliki potensi untuk menjadi leading sektor dalam memacu tingkat pertumbuhan pembangunan Daerah.
2. Perdagangan, Hotel dan Restoran, khususnya untuk subsektor perdagangan. Meskipun bukan sektor basis, namun punya peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah dan banyak melibatkan masyarakat kecil/menengah. Ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB diposisi kedua. Untuk itu dalam periode lima tahun pertama, sub sektor ini memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menjadi prioritas pembangunan di Musi Banyuasin
3. Industri pengolahan, khususnya pada subsektor industri tanpa migas. Potensinya cukup prospektif karena disamping kontribusinya signifikan terhadap PDRB (urutan ke-3), juga nilai basisnya cenderung terus meningkat. Untuk itu, sub sektor ini pun dapat menjadi prioritas pembangunan yang dapat dikembangkan dalam lima tahun pertama.

4. Subsektor perkebunan, dengan daya dukung alam Kabupaten Musi Banyuasin, subsektor ini kedepan akan menjadi andalan. Saat ini sudah mampu menempati posisi ke-4. sumbangannya terhadap perekonomian daerah. Untuk itu dalam lima tahun pertama, sub sektor ini dapat menjadi prioritas ke-empat yang dapat dikembangkan oleh Daerah.
5. Subsektor tanaman pangan, dimana sebagian besar penduduk (diatas 15%) mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, maka subsektor ini akan menjadi strategis untuk terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (posisi ke 5 sumbangannya terhadap perekonomian daerah).
6. Subsektor kehutanan. Subsektor ini menempati posisi ke 6 sumbangannya terhadap perekonomian daerah. Sub sektor kehutanan memiliki potensi yang sama dengan subsektor perkebunan dan sangat potensial untuk bersinergi dengan sektor industri dalam rangka pengembangan hutan tanaman industri, dan subsektor ini termasuk sektor basis.
7. Sektor bangunan. Dengan posisi ke-7 dalam kontribusinya pada perekonomian daerah, sektor ini perlu terus dipacu untuk mendukung kegiatan pembangunan yang makin tumbuh pesat di daerah Musi Banyuasin.
8. Subsektor jasa pemerintah. Sebagai stimulus pembangunan daerah, maka peran jasa pemerintah meski terus dipacu untuk masa-masa mendatang, baik dari kuantitas maupun kualitas pelayanannya.
9. Subsektor penggalian. Meski berada diposisi ke-9 kontribusinya, subsektor ini punya daya dorong dan daya tarik terhadap sektor/subsektor lainnya, sehingga perlu dipacu pengembangannya.
10. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Walaupun berada diposisi 10, sektor ini punya peran sangat strategis untuk mendukung kelancaran roda pembangunan daerah. Jika arus lintas keuangan terganggu, maka cukup mempersulit gerak langkah pembangunan secara umum. Untuk itu sektor ini mutlak untuk dipacu pertumbuhannya.

Selain sektor/subsektor tersebut diatas, sektor/subsektor lain bukan berarti tidak mendapat perhatian. Namun untuk memacu pertumbuhan pembangunan/ekonomi secara agregat (mengingat faktor *multiplier effect*-nya yang luas), maka urutan prioritas tersebut perlu menjadi perhatian dalam rangka pembangunan di Musi Banyuasin sebagai acuan.

### **Periode II (2010-2015)**

Pada periode lima tahun kedua ini, posisi sektor/subsektor tidak banyak berubah. Seperti posisi pertama sampai keenam tetap sama dengan pada periode I.

1. Subsektor minyak dan gas.
2. Subsektor perdagangan.
3. Subsektor industri tanpa migas. Pada periode ini subsektor ini sudah menjadi sektor basis.
4. Subsektor perkebunan.
5. Subsektor tanaman pangan.
6. Subsektor kehutanan.
7. Subsektor penggalian. Karena pertumbuhannya yang cukup pesat subsektor ini meningkat kontribusinya terhadap PDRB dari posisi ke-9 menjadi ke-7, dan posisi ini tetap sampai akhir masa perencanaan (2025).
8. Subsektor jasa pemerintah.
9. Sektor bangunan. Pada periode II ini sedikit menurun lajunya, dan tergeser oleh subsektor penggalian, sehingga berada diposisi ke-9.
10. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.

### **Periode III (2015-2020)**

Untuk periode lima tahun ke-III, perkembangan dan posisi setiap sektor/subsektor juga tidak jauh berbeda. Hanya terjadi perubahan posisi pada urutan 9 dan 10, sedangkan untuk urutan pertama sampai ke-8 tetap sama dengan pada periode II.

1. Subsektor minyak dan gas.
2. Subsektor perdagangan.
3. Subsektor industri tanpa migas.
4. Subsektor perkebunan.
5. Subsektor tanaman pangan.
6. Subsektor kehutanan.
7. Subsektor penggalian.
8. Subsektor jasa pemerintah.
9. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Pada periode ini sektor ini mengalami pertumbuhan lebih baik, sehingga berada diposisi 9 dari sebelumnya posisi 10.
10. Sektor bangunan. Sektor ini terus melemah pada periode ini. Karenanya berada pada posisi terakhir.

#### Periode IV ( 2020-2025 )

Pada periode terakhir perencanaan, perkembangan dan posisi sektor/subsektor terlihat lebih konstan. Karena tidak terjadi perubahan posisi dari periode sebelumnya (periode III), sebagaimana terlihat berikut ini :

1. Subsektor minyak dan gas.
2. Subsektor perdagangan.
3. Subsektor industri tanpa migas.
4. Subsektor perkebunan,
5. Subsektor tanaman pangan.
6. Subsektor kehutanan.
7. Subsektor penggalian.
8. Subsektor jasa pemerintah.
9. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.
10. Sektor bangunan.

Informasi selengkapnya tentang posisi basis dan ranking PDRB Sektor/Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dalam Periode Perencanaan 2005-2025 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 2.24 dan 2.25.

Peta potensi sumber daya alam masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada gambar 2.1 terlampir.

**Tabel 2.24**  
**Posisi dan Perkembangan Sub-Sektor Ekonomi**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Sektor	Kriteria Basis	Ranking PDRB	Trend Kontribusi	Trend LQ
1	<b>Pertanian</b>	Non basis	-	Naik	Turun
	a.Tanaman Pangan	Non basis	5	Naik	Konstan
	b.Perkebunan	Non basis	4	Naik	Turun
	c.Peternakan	Non basis	13	Konstan	Turun
	d.Kehutanan	Basis	6	Turun	Turun
	e.Perikanan	Basis	11	Turun	Naik
2	<b>Pertambangan&amp;Pengg</b>	Basis	-	Naik	Naik
	a. Migas	Basis	1	Naik	Turun
	b. Non Migas	-	-	-	-
	c. Penggalian	Basis	7	Naik	Turun
3	<b>Industri Pengolahan</b>	Non basis	-	Turun	Turun
	a.Industri Migas	-	-	-	-
	b. Industri tanpa Migas	Basis	3	Turun	Naik
4	<b>Listrik,Gas,Air Bersih</b>	Non basis	17	Naik	Naik

No	Sektor	Kriteria Basis	Ranking PDRB	Trend Kontribusi	Trend LQ
5	Bangunan	Basis	10	Turun	Naik
6	Perdagangan, Hotel, Rest	Non basis	-	Turun	Turun
	a. Perdagangan	Non basis	2	Turun	Turun
	b. Hotel	-	-	-	-
	c. Restoran	Non basis	15	Konstan	Turun
7	Pengangkutan & Komksi	Non basis	-	Naik	Turun
	a. Angkutan	Non basis	14	Naik	Naik
	b. Komunikasi	Non basis	16	Konstan	Turun
8	Keuangan, Sewa, Jasa Prush	Basis	9	Turun	Turun
9	Jasa-jasa	Non basis	-	Turun	Konstan
	a. Pemerintah	Non basis	8	Turun	Naik
	b. Swasta	Non basis	12	Konstan	Konstan
	PDRB dgn MIGAS	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis

**Tabel 2.25**  
**Prioritas Pengembangan Sektor/Sub Sektor**  
**Kabupaten Musi Banyuasin dalam Periode**  
**Pembangunan 2005-2025**

Prioritas	2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
Pertama	Sub Sektor Minyak & Gas	Sub Sektor Minyak & Gas	Sub Sektor Minyak & Gas	Sub Sektor Minyak & Gas
Kedua	Sub Sektor Perdagangan	Sub Sektor Perdagangan	Sub Sektor Perdagangan	Sub Sektor Perdagangan
Ketiga	Sub Sektor industri tanpa migas.	Sub Sektor industri tanpa migas.	Sub Sektor industri tanpa migas.	Sub Sektor industri tanpa migas.
Keempat	Subsektor perkebunan	Subsektor perkebunan	Subsektor perkebunan	Subsektor perkebunan
Kelima	Subsektor tanaman pangan	Subsektor tanaman pangan	Subsektor tanaman pangan	Subsektor tanaman pangan
Keenam	Subsektor kehutanan	Subsektor kehutanan	Subsektor kehutanan	Subsektor kehutanan
Ketujuh	Sektor bangunan	Subsektor penggalan	Subsektor penggalan	Subsektor penggalan
Kedelapan	Subsektor jasa pemerintah	Subsektor jasa pemerintah	Subsektor jasa pemerintah	Subsektor jasa pemerintah
Kesembilan	Subsektor penggalan	Sektor bangunan	Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan	Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan
Kesepuluh	Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan	Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan	Sektor bangunan	Sektor bangunan

Sumber: Hasil Analisis, 2005

## 2.4 ASPEK SARANA DAN PRASARANA

### 2.4.1 Sarana Sosial Ekonomi

#### 1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Musi Banyasin pada tahun 2005 yaitu :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) yang terdiri dari 1 unit TK Negeri dan 38 unit TK Swasta;
- b. Sekolah Dasar (SD) terdiri dari 416 unit SD Negeri, 16 unit SD Swasta, 2 unit MI Negeri dan 24 unit MI Swasta;
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) terdiri dari 1 unit SDLB Negeri;
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari 45 unit SMP Negeri, 11 unit SMP Terbuka, 29 unit SMP Swasta, 4 unit MTs Negeri dan 33 unit MTs Swasta;
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari 11 unit SMA Negeri dan 15 unit SMA Swasta, 1 unit Madrasah Aliyah Negeri dan 13 unit Madrasah Aliyah Swasta;
- f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdiri dari 3 unit SMK Negeri dan 2 unit SMK Swasta;

Berdasarkan data dari Diknas Kab. Muba kondisi sarana pendidikan tahun 2005 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2002 untuk SDN berjumlah 413 unit, SMPN 34 unit, SMAN 7 unit, SMKN 2 unit. Walaupun secara kuantitas meningkat, namun untuk saat ini kalau ditinjau dari penyebarannya, terlihat ketidakseimbangan pelayanan sarana pendidikan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, dan antara kawasan perdesaan dengan perdesaan lain yang terpencil.

Berdasarkan hal tersebut, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sarana pendidikan ke depan adalah ;

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- b. Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan sarana pendidikan di semua wilayah termasuk daerah terpencil, sehingga masyarakat pedesaan tidak selalu ke kota untuk menempuh pendidikan yang diinginkannya.

- c. Mendorong peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan berbasis keagamaan dan kejuruan/ keterampilan.

## 2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 terdiri dari Puskesmas Rawat Inap berjumlah 6 unit, Puskesmas Non Rawat Inap berjumlah 14 unit, Puskesmas Pembantu 93 unit dan Poliklinik Desa berjumlah 141 unit.

Ketidakseimbangan pelayanan sarana kesehatan dapat terlihat dari rasio tenaga medis yang menunjukkan penduduk yang dilayani relatif rendah serta persebaran sarana yang tidak merata. Hal ini terlihat dari sikap perilaku hidup sehat masyarakat yang masih belum menjangkau semua desa (35% KK). Disamping itu juga angka tingkat kematian bayi yang masih cukup tinggi yaitu 12 orang perseribu kelahiran, angka kematian balita yaitu 30 orang perseribu dan angka kematian ibu yaitu 243 orang perseratusribu.

Berdasarkan hal tersebut tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah;

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan obat-obatan pada semua Puskesmas termasuk didaerah terpencil, sehingga masyarakat pedesaan mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.
- c. Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat dalam rangka mendorong perilaku hidup sehat, sehingga perilaku ini akan menjadi pola hidup sehari-hari bagi semua masyarakat.

## 3. Sarana Perdagangan

Ketersediaan sarana perdagangan dan jasa masih sangat terbatas, ketersediaan pelayanan sarana perekonomian berupa pasar lingkungan dan pasar regional baru melayani wilayah Kecamatan Sekayu dan Sungai Lilin.

Tantangan pembangunan sektor perdagangan kedepan adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung seperti pasar, pusat pertokoan, sarana jalan penghubung, transportasi dan telekomunikasi pada semua wilayah Musi Banyuasin.
- b. Mendorong peran serta swasta dalam berinvestasi pada bidang usaha perdagangan.

#### 2.4.2 Prasarana Wilayah

##### 1. Air Bersih PDAM

Pelayanan air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2006 belum seluruh wilayah dapat terlayani. Dari 218 desa/Kelurahan yang ada, baru 147 desa/kelurahan atau 67,43 % yang dapat terlayani air bersih, sedangkan sisanya sebanyak 71 desa/kelurahan atau 32,57 % belum dapat terlayani air bersih PDAM.

Disisi lain potensi sumber air bersih cukup tersedia, seperti di Kecamatan Sanga Desa dengan debit sebesar 3 lt/det, Kecamatan Babat Toman dengan debit sebesar 5 lt/det, Kecamatan Sekayu sebesar dengan debit 35 lt/det, dan Kecamatan Bayung Lencir dengan debit sebesar 4 lt/det. Potensi ini perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan akan air bersih di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain itu, potensi sumber air bersih juga dapat memanfaatkan potensi dari sungai-sungai yang ada seperti Sungai Musi yang memiliki debit rata-rata 763 m<sup>3</sup>/detik, Sungai Lalan dengan debit rata-rata 301,2 m<sup>3</sup>/detik, Sungai Calik 227,6 m<sup>3</sup>/detik, dan Sungai Banyuasin yang memiliki debit rata-rata 513 m<sup>3</sup>/detik.

Sehubungan dengan kondisi dan potensi tersebut, maka tantangan pembangunan pelayanan air bersih adalah ;

- a. Meningkatkan pelayanan PDAM sehingga mampu menjangkau semua desa di wilayah Musi Banyuasin.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga akan mendorong pertumbuhan jumlah pelanggan baru disetiap desa yang sudah memiliki jaringan.
- c. Meningkatkan kualitas SDM PDAM dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kinerja perusahaan.



## 2. Ketenagalistrikan

Apabila dilihat dari jumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah terlayani listrik sampai 2005, dapat dikatakan tingkat pelayanan distribusi energi listrik yang dikelola PT. PLN sudah mencapai 73,89% dari total desa yang ada. Dari data yang ada, sebanyak 150 desa/Kelurahan sudah terlayani sedangkan sisanya sebanyak 53 desa belum terlayani.

Tingkat pertumbuhan pelayanan listrik masuk desa di kabupaten Musi Banyuasin memang cukup tinggi, yaitu rata-rata 36,36% pertahun. Oleh karena itu paling lambat selama 5 tahun pertama masa perencanaan (2005-2010) diharapkan semua desa sudah dapat terlayani oleh jaringan listrik. Hal ini tidak sulit untuk dicapai karena target minimal 10 desa tiap tahun adalah cukup realistis untuk dicapai.

Tantangan pembangunan ketenagalistrikan ke depan adalah :

- a. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik serta keandalannya, sehingga mampu menjangkau semua desa di wilayah Musi Banyuasin, paling lambat pada akhir tahun 2010.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga akan mendorong pertumbuhan jumlah pelanggan baru disetiap desa yang sudah memiliki jaringan.
- c. Peningkatan kemampuan industri ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan kualitas SDM dalam upaya pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kinerja perusahaan.

## 3. Pelayanan Telekomunikasi

Pelayanan telepon di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin masih terbatas pada wilayah di Kecamatan Sekayu. Sedangkan daerah lain baru sampai pada pelayanan dikantor-kantor kecamatan. Saat ini seluruh kantor kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin memang sudah dapat dilayani sambungan telepon otomatis.

Secara keseluruhan pelayanan telepon untuk wilayah Musi Banyuasin berdasarkan data sampai tahun 2005 sudah menunjukkan ratio cukup baik yaitu 102 perseribu penduduk, jauh diatas ratio rata-rata Sumatera Selatan.

Oleh karena itu dengan pertimbangan efisiensi pendanaan akibat perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi seperti jarak, waktu, biaya, tenaga kerja serta faktor-faktor produksi lainnya, maka tantangan pengembangan pelayanan telekomunikasi di masa mendatang adalah

- a. Pemenuhan kebutuhan akan layanan telekomunikasi untuk menjamin ketersediaan jasa telepon, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses masyarakat dari keterisolasian.
- b. Mengupayakan pengembangan jaringan telepon sehingga mampu menjangkau semua desa di wilayah Musi Banyuasin, paling lambat pada akhir tahun 2010.
- c. Meningkatkan ratio sambungan dengan jumlah penduduk yang akan mendorong pertumbuhan jumlah pelanggan baru di setiap desa.
- d. Peningkatan peran serta swasta untuk pengembangan teknologi telematika terutama yang berbasis nirkabel di semua wilayah Musi Banyuasin.

#### **4. Transportasi**

Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu daerah yang dilalui jaringan jalan regional lintas Sumatera bagian Timur (menghubungkan Palembang–Jambi) dan dilalui pula oleh sungai besar maupun kecil sebagai prasarana transportasi sungai yang banyak dimanfaatkan penduduk. Hubungan antar wilayah baik dari maupun ke Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui kedua prasarana transportasi tersebut.

##### **a) Transportasi Darat**

Sebagai daerah yang dilalui jaringan jalan regional, Kabupaten Musi Banyuasin punya posisi cukup strategis untuk dikembangkan. Pengembangan wilayah dan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan jaringan jalan yang ada dan membangun jaringan jalan baru untuk membuka daerah-daerah terisolir yang memiliki potensi sumberdaya alam melimpah.

Dalam kaitannya dengan pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, maka sistem transportasi wilayah perlu lebih difokuskan pada sistem transportasi darat. Hal ini disebabkan cukup tingginya tingkat pergerakan yang terjadi dalam wilayah maupun antar wilayah, juga transportasi darat merupakan salah satu penunjang kelancaran kegiatan transportasi lainnya (sungai), yaitu dalam kaitannya dengan pergerakan dari dan ke pelabuhan.

Peranan transportasi darat di Kabupaten Musi Banyuasin sangat penting peranannya dalam mempengaruhi perkembangannya. Pergerakan penduduk dengan berbagai aktivitas dilayani oleh ketersediaan prasarana dan sarana transportasi darat.

Umumnya pergerakan yang dilakukan oleh penduduk di dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan moda transportasi darat adalah dengan pola pergerakan *based activity* yaitu pergerakan dari tempat tinggal menuju tempat kerja atau sekolah. Secara umum moda angkutan yang digunakan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. Pola pergerakan yang tinggi terjadi pada kawasan pusat kota dengan kegiatan utama adalah perdagangan dan jasa.

Sedangkan pola pergerakan antar wilayah dari dan menuju Kabupaten Musi Banyuasin dicirikan oleh pergerakan regional antara Sekayu – Palembang dan Sekayu – Betung yang terhubung dengan ruas jalan negara (lintas Sumatera Bagian Timur).

### **1. Prasarana Jaringan Jalan**

Berdasarkan data pada Dinas PU Bina Marga Kab. Muba pada tahun 2004 jaringan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 147,6 km jalan negara, 189,0 km jalan propinsi, 926,5 km jalan kabupaten, dan 950 km jalan desa. Kondisi jalan tersebut 15 % atau 139 km baik, 20 % atau 185,3 km sedang, 25 % atau 231,6 km rusak dan 40 % rusak berat.

Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan jalan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

- ✓ Sarana dan prasarana yang kurang memadai,
- ✓ Kondisi topografi Kabupaten Musi Banyuasin yang sebagian besar berupa rawa-rawa,
- ✓ Terjadinya bencana alam banjir dan hujan yang terus menerus,
- ✓ Seringnya overload akibat aktivitas pembangunan/perusahaan di kabupaten Musi Banyuasin.

Permasalahan menjadi tantangan ke depan dalam meningkatkan penanganan jalan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

### **2. Sistem Moda Kendaraan**

Moda angkutan darat di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari kendaraan bermotor yang dapat diklasifikasikan sebagai mobil penumpang, mobil bus, dan truk. Dilihat dari jenisnya, maka jenis truk dan pick up bukan umum merupakan jenis kendaraan paling banyak.

Perkembangan dari tahun 2003-2004, menunjukkan jumlah kendaraan yang ada mengalami kenaikan sebesar 27,16 %. Kecuali bus umum, bus tak umum dan pick up umum yang mengalami penurunan, kendaraan jenis lainnya mengalami kenaikan.

Jenis sarana penunjang yang terdapat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis fasilitas yaitu terminal, tempat parkir kendaraan, rambu lalu lintas dan rambu traffic light. Sarana penunjang angkutan jalan raya umumnya terdapat di ibukota kecamatan yang dilalui jalan negara atau jalan propinsi dan Kota Sekayu.

### **3. Angkutan Umum**

Peranan angkutan umum di Kabupaten Musi Banyuasin sangat membantu kelancaran pergerakan di dalam kota dan antar kota. Untuk membantu kelancaran di dalam kota, maka jenis kendaraan yang digunakan penduduk adalah kendaraan bermotor, yang terdiri dari angkutan penumpang dan motor. Masing-masing kendaraan mempunyai karakteristik dan pelayanan yang berbeda.

Sedangkan untuk pergerakan dari dan menuju Kabupaten Musi Banyuasin dilayani oleh moda angkutan bus diantaranya melayani trayek Sekayu – Palembang. Selain itu, pergerakan penduduk dari Sekayu ke Sungai Lilin dan Bayung Lencir dilayani oleh moda angkutan jenis bus dan umumnya perpindahan moda angkutan terjadi di kota Betung.

Hubungan antar wilayah di dalam Kabupaten Musi Banyuasin dilayani oleh moda angkutan umum perdesaan yang menghubungkan kota Sekayu dengan kota-kota kecamatan lainnya.

### **4. Terminal**

Selain jaringan jalan, prasarana transportasi lain yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin adalah terminal dan sub terminal angkutan darat. Untuk keperluan dalam kota dan antar kota terdapat beberapa terminal, antara lain Terminal Sekayu, Terminal Sungai Lilin dan Terminal Bayung Lencir.

Kondisi sub-sub terminal yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin pada saat ini dapat dikatakan cukup layak sebagaimana fungsi terminal pada umumnya, dalam hal ini meliputi :

- Lokasi sub terminal yang tidak sesuai dengan fungsi lahan yang ada disekitarnya, sehingga sirkulasi angkutan umum yang akan memasuki dan keluar dari terminal tersebut dapat menghambat laju kendaraan yang melintas ruas jalan yang berpotongan dengan jalan masuk dan keluar terminal. Hal ini terlihat pada Sub Terminal Sungai Lilin.
- Terkait dengan kondisi di atas adalah fungsi dari sub terminal itu sendiri yang hanya bersifat terminal sementara (darurat) yang digunakan sebagai tempat sirkulasi angkutan umum padahal fungsi fungsi lahan sebenarnya adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa (Pasar dan Pertokoan).

Untuk meningkatkan aksesibilitas antar bagian wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin, maka tantangan dalam pengembangan dan pembangunan transportasi darat adalah;

- a. Meningkatkan fungsi dan peranannya untuk menunjang perwujudan struktur tata ruang wilayah yang diinginkan.
- b. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil.
- c. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu, melalui, 1) penataan sistem jaringan dan terminal, 2) manajemen lalu lintas terutama yang terkait dengan retibusi jalan, penataan jaringan dan ijin trayek, 3) kerjasama antara lembaga pemerintah (antar kabupaten dan dengan propinsi).
- d. Peningkatan fungsi ruas jalan yang terkait dengan hirarki pusat-pusat pelayanan untuk mempertinggi aksesibilitas antar pusat pelayanan di Utara dan Selatan kabupaten.
- e. Mengembangkan transportasi yang berkelanjutan terutama transportasi umum yang masal, terjangkau dan efisien yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Untuk itu pengembangan dan mengintensifkan
- f. transportasi udara kedepan adalah suatu kebutuhan untuk direalisasi, yang menghubungkan Sekayu dengan kota lainnya.

## **b) Transportasi Sungai**

Mengingat potensi sungai yang cukup besar dan terbatasnya prasarana maupun sarana perhubungan darat, maka sungai-sungai di Kabupaten Musi Banyuasin memegang peranan penting sebagai prasarana perhubungan, khususnya dalam upaya memenuhi pelayanan angkutan dari daerah pedalaman menuju ke wilayah kota atau sebaliknya dari wilayah kota menuju ke pedalaman.

### **1. Prasarana Transportasi Sungai**

Sungai di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi/perhubungan adalah Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas, dan Sungai Supat.

### **2. Sarana Transportasi Sungai**

Jenis angkutan sungai yang digunakan sebagai sarana perhubungan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar berupa kapal motor yang mempunyai kapasitas cukup besar, selain itu muatan yang diangkut sebagian besar berupa muatan manusia dan hasil pertanian/perkebunan. Jumlah kendaraan angkutan sungai di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2005 berjumlah kurang lebih 464 buah.

Transportasi sungai masih merupakan aspek penting dalam pergerakan penduduk, khususnya dalam menghubungkan wilayah kota dengan daerah-daerah hinterlandnya.

Saat ini dermaga sungai yang melayani keluar masuk kapal di Kabupaten Musi Banyuasin antaranya Dermaga Sekayu, Satker/Unit Pengawasan Lalu-Lintas Angkutan Sungai dan Danau (UPLLASD) Karang Agung, UPLLASD Sungai Lilin, dan UPLLSD Kepahyang. Mengingat peran pentingnya sungai dalam penyebaran penduduk, maka diperlukan usaha peningkatan kondisi sarana dan prasarana yang ada.

Dengan mengacu pada potensi sungai yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maka tantangan pengembangan transportasi sungai ke depan adalah :

- a. Mengembangkan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai terutama bagi daerah pedalaman yang terbatas transportasi daratnya.
- b. Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana angkutan sungai.

- c. Mendorong peran serta pemda dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan sungai yang efektif dan efisien.

## 2.5. TANTANGAN

1. Dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi tantangan jumlah penduduk yang makin besar, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2025 berjumlah 769.131 jiwa. Sejalan dengan itu pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penting diperhatikan agar terjadinya penduduk yang tumbuh seimbang dimana penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non produktif. Tantangan ini juga perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat, guna menuju Kabupaten Muba yang lebih mandiri.
2. Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator kemajuan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin 68,7 cukup baik (Urutan ke-5) dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Selatan. Hal ini sudah menunjukkan upaya yang maksimal Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun 20 puluh tahun kedepan pembangunan pendidikan dan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting. Dibidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi meningkatkan akses pelayanan kesehatan disemua wilayah dan semua tingkatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin; meningkatkan peyebaran tenaga kesehatan; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.  
  
Sementara itu tantangan yang dihadapi bidang pendidikan adalah meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing global; meningkatkan manajemen pendidikan ; menurunkan jumlah penduduk buta aksara, meningkatkan partisipasi dalam bidang pendidikan sehingga menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan masyarakat antara masyarakat mampu dan tak mampu, perkotaan dan perdesaan, daerah maju dan tertinggal, serta antar jenis kelamin. Mendorong pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan, kejuruan dan ketrampilan. Kemajuan bidang pendidikan harus diiringi kemajuan teknologi diberbagai bidang pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin agar tetap menjadi Kabupaten yang terdepan.
3. Tantangan bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga baik tingkat regional, nasional dan internasional.

4. Pembangunan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menuju ekonomi yang tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkualitas 20 tahun kedepan. Untuk itu tantangan kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan serta berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi ketertinggalan untuk menjadi daerah yang paling maju di Sumatera Bagian Selatan.
5. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi komposisi angkatan kerja ditahun 2005 sekitar 69 persen berpendidikan SD, dalam 20 tahun kedepan komposisi penduduk angkatan kerja diharapkan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP dan SMU yang terampil , sehingga perekonomian dimasa depan akan mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak. Selain itu kemampuan mengembangkan potensi kabupaten Musi Banyuasin terus ditingkatkan untuk terwujudnya kemandirian dan ekonomi yang berdaya saing sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi dari luar dan semakin meningkatnya peran BUMD dan kelembagaan ekonomi lainnya ( koperasi dan UMKM) dalam meningkatkan perekonomian dan kemandirian daerah.
6. Tantangan dalam pemecahan permasalahan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu lebih ditingkatkan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini dibidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur menjadi dasar yang kuat dalam meningkatkan kualitas masyarakat miskin. Perencanaan dan penganggaran harus lebih berpihak pada masyarakat miskin, peningkatan sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah dalam penganggulangan kemiskinan, dan meningkatkan keberdayaan masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan pemahaman bahwa mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna menghasilkan sentra kegiatan ekonomi.



**BAB III**  
**VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN**  
**MUSI BANYUASIN TAHUN 2005-2025**

**3.1 VISI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Daerah perlu memiliki sebuah visi sebagai refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah. Dengan visi maka semua kemampuan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin akan dioptimalkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Bahkan lebih jauh dari itu, sebagai konsekuensinya seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan dalam dua puluh tahun mendatang, baik oleh pemerintah, maupun swasta dan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin harus disinergikan untuk pencapaian visi daerah.

Perumusan visi daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kristalisasi dari keinginan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah Kabupaten Musi Banyuasin sekaligus menjadi amanah yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui sejumlah kebijakan, program dan kegiatan daerah. Visi daerah selain memberikan arah dan focus strategi yang jelas, juga mampu menjadi perekat seluruh komponen pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah.

Perumusan visi ini sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk menuju Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur juga selaras dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, yang berkembang pada tatanan global yaitu pembaharuan pemerintahan (*reinventing government*).

Dalam pembaharuan pemerintahan tersebut, dituntut peran pemerintah untuk lebih terbuka (*transparency*), bertanggung jawab (*Accountability*), ahli pada bidangnya (*professional*) dalam penyelenggaraann pelayanan public (*public service*).

Selain itu, PBB (2005) telah merekomendasikan satu model pembangunan abad millennium melalui konsep “ *Miillenium development goals (MDG)* “, yaitu satu tujuan pembangunan bersama (dunia) dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat global, mulai dari peingkatan kemampuan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, permukiman sampai kepada pengarustamaan gender, dan terciptanya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat dunia.

Kondisi seperti ini sedang diusahakan dalam pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin melalui pemerintahan yang digerakkan oleh visi sehingga masyarakat memperoleh manfaat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dan tentu, tujuan terciptanya suatu tatanan ekonomi yang maju yang sejalan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat akan selalu menjadi komitmen bersama seluruh kelompok pemangku kepentingan di Musi Banyuasin.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka visi daerah Musi Banyuasin untuk dua puluh tahun mendatang ( 2025) akan ditopang tiga pilar utama yaitu ;

- Pertama, *kemajuan pembangunan;*
- Kedua *kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;*
- Dan pilar ketiga, *pemerintahan yang adil, jujur dan bersih.*

Sesuai dengan uraian diatas, maka visi daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

### **” MUBA MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA 2025 ”**

Penjelasan dari visi Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Musi Banyuasin yang maju, artinya pembangunan Musi Banyuasin merupakan paling maju dan terdepan di kawasan Sumatera Bagian Selatan.
2. Musi Banyuasin yang mandiri, artinya pembangunan di Musi Banyuasin yang bertumpu pada kemampuan sendiri, untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kemandirian.
3. Musi Banyuasin yang sejahtera, artinya tercapainya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Musi Banyuasin yang merata pada semua aspek
4. untuk mendukung Musi Banyuasin yang maju, mandiri dan sejahtera 2025, harus didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang adil, jujur, dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai suatu daerah

Tingkat kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari *indikator sosial* , kemajuan daerah diukur dari kualitas sumber daya manusia. Suatu daerah dikatakan maju apabila sumber daya manusianya memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, berakhlak dan berkepribadian mulia. Tingginya kualitas pendidikan ditandai makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan serta tenaga terampil dan profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin juga diukur berdasarkan *indikator kependudukan*, dengan melihat pada laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat. Daerah yang maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan pelayanan sosial yang lebih baik. Dan kualitas sumber daya manusia yang makin baik tercermin dari produktivitas yang makin tinggi.

Perkembangan ekonomi yang semakin baik melalui tingginya tingkat pendapatan rata-rata dan berkembangnya sektor industri dan jasa serta tingginya penyerapan tenaga kerja juga menjadi cerminan daerah yang maju. Selain itu keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, sektor jasa, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan akan memacu berkembangnya ekonomi daerah.

Selain indikator sosial ekonomi yang baik, sistem kelembagaan dan hukum yang baik, serta peran serta masyarakat secara nyata dan efektif di segala aspek kehidupan, ekonomi, sosial dan politik dan keamanan menjadi faktor yang menentukan kemajuan daerah. Daerah yang maju apabila hak-hak masyarakat terjamin, pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata dan juga didukung infrastruktur yang baik.

Kemandirian Kabupaten Musi Banyuasin ditandai dengan kesejajaran dengan daerah lain bahkan lebih maju dari daerah lain di kawasan Sumatera bagian Selatan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian bukan keterisolasian namun membangun kondisi saling ketergantungan dengan daerah lain secara proaktif, namun dengan segala sumber daya yang dimiliki.

Tingginya kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas untuk kemandirian agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Kemandirian aparatur pemerintah yang jujur dan bersih dari Kolusi, korupsi, dan Nepotisme dan aparatur penegak hukum yang baik menjadi suatu keharusan. Kemandirian sesungguhnya bagaimana semangat masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin mengenal dirinya dan bersemangat menghadapi tantangan-tantangan.

Karena menyangkut kemandirian pada dasarnya akan dipengaruhi oleh masalah nilai budaya masyarakat.

Apabila Kemajuan dan kemandirian sudah mantap, cerminan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat secara merata; tersedianya lapangan pekerjaan; tersedianya pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; serta perlindungan hukum yang terjamin.

### 3.2 MISI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dalam mewujudkan visi yang merupakan gambaran masa yang akan datang yang ingin dicapai daerah, maka tahapan berikutnya daerah harus menetapkan misi yang jelas, sebagai proses bagaimana mencapai visi tersebut. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi terlaksana dengan baik .

Selain itu misi daerah haruslah jelas sesuai dengan amanat dan kewenangan daerah. Pernyataan misi membawa daerah kepada suatu fokus tertentu. Misi merupakan tonggak dari perencanaan daerah dalam mewujudkan cita-cita yang diinginkan.

Ada 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan oleh daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :

**1. Mengembangkan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan pemerataan;**

Sejalan dengan potensi yang dimiliki, daerah Musi Banyuasin memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Bagian Selatan. Namun, pembangunan ekonomi yang dikembangkan harus mampu memberikan keuntungan terbesarnya bagi masyarakat Bumi Serasan Sekate itu sendiri.

Model pembangunan yang dikembangkan harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan ekonomi lokal dengan berlandaskan bukan hanya pada pertumbuhan tapi juga pemerataan;

**2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;**

Pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah potensi yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong kualitas kehidupan masyarakat, namun ketentuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini harus memperhatikan keberlanjutan (*Sustainability development*);

**3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pembangunan;**

Dalam upaya mendorong pencapaian Bumi Serasan Sekate yang maju , mandiri, dan sejahtera, maka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan menjadi kebutuhan mutlak yang harus tersedia dua puluh tahun kedepan;

**4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;**

Ada 4 (empat) komponen yang menjadi penopang utama terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, yaitu : (1) bidang kesehatan; (2) bidang pendidikan; (3) perluasan kesempatan berusaha; serta (4) ketahanan pangan dan perumahan.

**5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan nilai budaya setempat;**

Partisipasi masyarakat dan termasuk optimalisasi nilai budaya lokal dalam memacu kemandirian dan kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan dua puluh tahun mendatang

**6. Mengembangkan pemerintahan yang adil, jujur, dan bersih;**

Pemerintahan sebagai salah satu pelaku pembangunan memiliki peranan sangat utama dalam mendukung pencapaian kemajuan dan pemerataan pembangunan dan kemandirian yang dicita-citakan masyarakat di Musi Banyuasin. Dengan sentralnya posisi pemerintahan ini, maka penciptaan pemerintahan yang adil, jujur serta bersih termasuk dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme menjadi suatu keharusan.

**7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan;**

Komitmen seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera harus direfleksikan dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terbaik serta tegaknya kepastian hukum dalam keseluruhan penyelenggaraan pembangunan.

## BAB IV

### ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Arah pembangunan daerah merupakan strategi pencapaian visi dan misi daerah yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang. Arah pembangunan ini akan dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan tiga pilar visi Daerah kabupaten Musi Banyuasin, yaitu : Peningkatan kemajuan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerintahan yang adil, jujur dan bertanggungjawab serta bersih dari KKN.

Dari tiga pilar utama visi daerah serta ketujuh misi daerah Musi Banyuasin tersebut, maka selanjutnya dirumuskan tiga agenda *prioritas* peningkatan pembangunan daerah, yang terdiri dari :

1. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi; sebagai agenda untuk mencapai misi pertama, kedua, dan ketiga;
2. Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; sebagai agenda untuk mencapai misi keempat dan kelima;
3. pembangunan pemerintahan yang adil, jujur dan bersih; sebagai agenda untuk mencapai misi keenam dan ketujuh.

Terwujudnya Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera menjadi komitmen semua unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dimana mensyaratkan kondisi masyarakat yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan ekonomi local dengan bukan hanya berlandaskan pada pertumbuhan, tapi juga pemerataan, ditopang masyarakat yang berkualitas bidang pendidikan, ketrampilan, kesehatan, ketahanan pangan dan perumahan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan yang mengacu pada arah pembangunan dengan dilandasi strategi pertumbuhan, pemerataan, keserasian, keseimbangan, interkoneksi serta dinamis. Berdasarkan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

## **A. AGENDA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

### **A.1 Mengembangkan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan pemerataan**

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, sasaran umum pembangunan ekonomi Kab. Musi Banyuasin adalah :

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, meningkatnya daya beli masyarakat dengan terkendalinya laju inflasi, serta meningkatkan kualitas pertumbuhan agar tercipta lapangan kerja yang memadai bagi penurunan pengangguran serta berkurangnya penduduk miskin.
2. Sasaran pokok pembangunan ekonomi diletakkan pada upaya-upaya
  - a) Meningkatkan investasi
  - b) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang bersumber dari kekuatan ekonomi local
  - c) Menjaga stabilitas pengalokasian Anggaran Pemerintah (APBD)
  - d) Meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja.

### **A.2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup didasarkan pada pengelolaan yang berkelanjutan ( *Sustainability development* ) diikuti dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur sebagai penopang tumbuhnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pokok terwujudnya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditandai dengan :

1. Terwujudnya Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya Kekayaan , keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan.

3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
4. Peningkatan Peran Perusahaan pengelolaan SDA dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

### **A.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pembangunan**

Dalam upaya mendorong tercapainya Muba yang maju dan sejahtera, maka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan menjadi kebutuhan mutlak yang harus tersedia di bumi serasan sekate dalam 20 tahun kedepan, untuk itu sasaran pokok peningkatan kualitas dan kuantitas parasarana dan sarana adalah :

1. Tingkat penyediaan prasarana dan sarana pembangunan secara merata di seluruh wilayah sehingga berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang lebih baik, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
3. Pembangunan infrastruktur seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai peggerak ekonomi masyarakat.
4. Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung hunian bagi seluruh masyarakat.

### **B. AGENDA PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Berkaitan dengan peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat , maka sasaran pembangunan adalah :

1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan setara atau lebih baik dari Kabupaten/Kota di Sumatera Bagian Selatan. Dengan tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 % dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 %.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



3. Terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, migas menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas yang berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, sebagai motor penggerak perekonomian, serta meningkatnya sektor jasa yang lebih bermutu dan berdaya saing.
4. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas, profesional, bersih dari KKN dan siap menghadapi globalisasi.
5. Memperkuat Keuangan Daerah melalui Penggalan sumber-sumber keuangan daerah.

### **B.1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat**

Sasaran pokok meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yaitu :

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dengan semakin menurunnya masyarakat berpendidikan rendah. Pembinaan sistem pendidikan sehingga dapat menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang berkualitas, terampil dan profesional.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan tingginya angka harapan hidup dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
3. Terwujudnya produktivitas masyarakat yang tinggi sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk mengurangi angka pengangguran.
4. Meningkatnya produksi pangan guna menjamin ketersediaan pangan untuk masyarakat.
5. Meningkatnya peran Ilmu Pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang.
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat didukung pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel

### **B.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan nilai budaya setempat**

Sasaran pokok peningkatan partisipasi masyarakat dan nilai budaya setempat adalah :Terwujudnya karakter daerah yang kompetitif berakhlak mulia, bermoral dengan dilandasi masyarakat Muba yang beriman, bertaqwa, kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berkembang dinamis dan berorientasi iptek.

1. Makin mantapnya nilai budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, budaya, harkat, dan martabat serta menguatnya jati diri melalui pengembangan kepariwisataan dan objek-objek wisata Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

### **C. AGENDA PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN YANG JUJUR, ADIL DAN BERSIH**

Untuk mendukung tercapainya pembangunan Musi Banyuasin yang maju, mandiri, dan sejahtera dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan pula arah sasaran pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### **C.1. Mengembangkan Pemerintahan Yang Adil, jujur, dan bersih**

Tujuan utama prioritas ini adalah terciptanya tata pemerintahan yang jujur, adil, dan bersih dari KKN, peningkatan kualitas layanan masyarakat, serta terciptanya kepastian hukum dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu sasaran pembangunan diarahkan pada :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan (*Institutional capacity building*), meliputi lembaga eksekutif dan legislative.
2. Semakin meningkatnya kemampuan keuangan daerah termasuk penguatan institusi daerah dalam mengelola dana APBD, serta dalam menggali potensi sumber keuangan daerah.
3. Meningkatnya pengembangan informasi komunikasi dan media massa untuk menjamin transparansi dan keterbukaan informasi, kedewasaan dan kebebasan media pers dan media masa sejalan dengan undang-undang dan tata peraturan daerah yang berlaku.
4. Peningkatan peran lembaga politik, baik lembaga politik penyelenggaraan daerah maupun lembaga politik kemasyarakatan.

## **C.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat serta Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pembangunan**

Sasaran dari peningkatan kualitas pelayanan masyarakat serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya fungsi dan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menerapkan system pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan
2. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

### **4.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025**

#### **4.1.1. MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

Untuk mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi maka arah pembangunan adalah sebagai berikut :

##### **▪ MENGEMBANGKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG SEJALAN DENGAN PEMERATAAN**

1. Pengembangan Ekonomi lokal diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat yang bersumber pada kekuatan ekonomi local yang berdaya saing global dengan melibatkan seluruh kelompok pelaku pembangunan untuk meningkatkan kepastian berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan , mengarah pada terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan bagi terwujudnya sasaran ekonomi yang berdaya tahan tinggi. Selain itu diarahkan pada menjaga stabilitas pengalokasian anggaran pemerintah (APBD) sehingga diharap mampu untuk pengendalian dampak krisis yang terjadi.
2. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai kemajuan ekonomi dengan menerapkan sistem kelola pemerintah yang baik dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif, menjaga, mengembangkan , dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, melindungi konsumen, mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan daya saing Usaha kecil dan Menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi.

3. Penciptaan dan peningkatan Investasi diarahkan pada terbangunnya struktur ekonomi yang kuat dengan peningkatan investasi mendorong peningkatan berbasis produksi dan ekspor non migas serta mineral diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, mendorong penanaman modal, selain itu untuk memperkuat ketahanan pangan dengan penggerak sector industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam dan secara berkelanjutan termasuk industri yang berbasis SDA seperti agro bisnis, kelautan, pertambangan dan sumber daya mineral.
4. Pembangunan industri diarahkan pada pengembangan kegiatan industri diarahkan pada industri yang berdaya saing dengan pengembangan industri kecil dan menengah dengan struktur ekonomi yang sehat, didukung pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan termasuk industri yang berbasis Sumber Daya Alam seperti agro bisnis, kelautan, pertambangan, dan sumber daya mineral, juga industri pengolahan bahan baku.
5. Pembangunan sektor pertambangan diarahkan pada peningkatan pengelolaan potensi pertambangan adalah peningkatan eksplorasi dalam rangka meningkatkan produksi, peningkatan eksploitasi yang selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, peningkatan manfaat pertambangan dan nilai tambah, dan mengevaluasi aturan kebijakan yang tidak sesuai.
6. Pengembangan kegiatan pertanian diarahkan pada pengembangan pertanian yang efisiensi, modernisasi dan nilai tambah yang berdaya saing sektor pertanian secara terpadu, baik pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan rakyat/ perkebunan inti rakyat, dan perikanan, hal ini menjadi faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan ketahanan pangan. Peningkatan kesejahteraan petani dalam arti luas dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien melalui revitalisasi kelembagaan, optimalisasi sumber daya , pengembangan sumber daya manusia, agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan respon terhadap permintaan pasar serta memanfaatkan peluang usaha. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, pada gilirannya perekonomian pedesaan dapat meningkatkan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

7. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perbaikan data ketenagakerjaan , mendorong sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal dan informal. Perluasan kesempatan berusaha dan bekerja terutama bagi penduduk miskin, dan peningkatan produktivitas pekerja dan penduduk usia kerja dengan dukungan program-program pelatihan yang strategis, efektif dan efisien.
8. Arah pembangunan pengembangan UKM dan koperasi adalah untuk mewujudkan system ekonomi yang efisien, produktif dan berdaya saing, mampu menenmbus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha.
9. Pembangunan dalam bidang infrastruktur diarahkan pada peningkatan daya dukung sarana dan prasarana agar mampu memberikan dukungan yang maksimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat serta sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang ada diikuti pengembangan infrastruktur yang baru sejalan dengan pengembangan wilayah dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu harus dilakukan penyempurnaan sistem tata peraturan daerah tentang peningkatan keterlibatan swasta dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyediaan infrastruktur.
10. Pengembangan wilayah diarahkan pada pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah kota dan desa, serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing kawasan dalam rangka menunjang pembangunan kabupaten. Upaya-upaya pokok yang dilakukan adalah :
  - a. Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang didukung oleh penegakan hukum yang adil dan transparan.
  - b. Pengembangan wilayah strategis dan cepat berkembang khususnya wilayah Sekayu-perbatasan Musi rawas, Sekayu- perbatasan Kabupaten Muara Enim, Sekayu-Betung, Sungai Lilin dan sekitarnya, Bayung Lencir dan sekitarnya, daerah yang mempunyai potensi SDA dan lokasi strategis untuk dikembangkan sebagai wilayah pertumbuhan.
  - c. Peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan tertinggal guna penghapusan desa tertinggal.

Hal ini didukung dengan pengembangan wilayah strategis dan cepat berkembang yang mempunyai potensi sumber daya alam serta merupakan

wilayah pusat pertumbuhan antara lain dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sebagai kawasan perdagangan, serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai kota/kabupaten, propinsi, dan luar negeri. Selanjutnya arah pengembangan wilayah :

a. Penataan Ruang

Arah pembangunan penataan ruang adalah meningkatnya keserasian tata ruang dan pemanfaatan ruang dengan potensi wilayah ekosistemnya serta pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembangunan antar sector. Hal ini didukung dengan pengelolaan pertanahan melalui penegakan hukum yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat, penyempurnaan system pendaftaran tanah, pemberian ijin, dan status ruang yang mudah diakses oleh masyarakat

b. Penatagunaan Air

Arah pembangunan penatagunaan daya air diarahkan pada pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya air untuk menjamin kebutuhan serta menyerasikannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, social, dan pengendalian banjir.

c. Perumahan dan permukiman

Arah pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan perumahan serta terbentuknya lingkungan yang sehat dan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana permukiman serta tercapainya pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat.

d. Fasilitas umum

Arah pembangunan pengembangan fasilitas umum diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan fasilitas Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Kabupaten yang maju dan mandiri.

▪ **MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**

Untuk mencapai misi ini maka arah pembangunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada pemanfaatan sumber daya

alam baik migas maupun non migas yang sejalan dengan upaya-upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya pemanfaatan dan optimalisasi energi non migas sebagai alternative energi dimasa yang akan datang. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola Sumber daya alam dan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, peningkatan SDM yang berkualitas, pengembangan budaya lingkungan yang memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan.

2. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan penerapan iptek serta lingkungan yang saling mendukung, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam yang rusak, perlindungan lingkungan global, pengendalian pencemaran, penegakan hukum, pengakuan hak asasi masyarakat adat dan local, tata kelola berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

3. Sumber Daya Air

Menjamin keberlanjutan daya dukung dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan air dan memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

4. Pemanfaatan SDA yang unik dan Khas

Meningkatkan nilai tambah dan inovasi pengolahan hasil SDA agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga SDA dapat diakses dan dinikmati masyarakat lokal, termasuk pengembangan mutu untuk merebut persaingan global yang tidak saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi tapi juga pada aspek sosial dan lingkungan.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, terutama bagi generasi muda sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian dimasa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

▪ **MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA PEMBANGUNAN**

Guna tercapainya sasaran pokok diatas, maka pembangunan diarahkan pada

1. Pembangunan transportasi diarahkan pada pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan pembangunan sistem transportasi baik transportasi sungai, darat, dan udara. Selanjutnya pemeliharaan jalur utama (primer) terutama yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah dan jalur poros di kota-pedesaan. *Prioritas* dalam bidang transportasi adalah melakukan pengembangan jalur baru yang dinilai memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi dan wilayah secara keseluruhan serta perintisan system transportasi kereta api melalui kemitraan dengan pihak BUMN atau swasta baik system transportasi local, regional maupun nasional.
2. Pembangunan system informasi dan komunikasi daerah dilakukan melalui pengembangan kerjasama serta fasilitas dengan kelembagaan pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi. Pembangunan system informasi dan komunikasi daerah harus sejalan dengan percepatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Untuk itu salah satunya daerah dapat memanfaatkan system informasi dan komunikasi tanpa kabel ( *nir kabel* ) sebagai basis dalam pengembangan bidang informasi dan komunikasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi perekonomian dan rumah tangga, pembangunan kelistrikan diarahkan pada peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana tenaga listrik, melalui rehabilitasi dan pembangunan pembangkit baru, transmisi dan distribusi listrik serta peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa listrik dan jaringannya.
4. Dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan air bersih serta penyehatan lingkungan dilakukan peningkatan penyediaan air dan pengelolaan air minum dan bersih serta kegiatan penyehatan lingkungan kawasan perkotaan serta kawasan-kawasan baru. Selain itu dilakukan penyempurnaan peraturan dalam tata peraturan daerah dibidang air minum dan air bersih serta bidang penyehatan lingkungan, perbaikan serta peningkatan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan hidup serta pengembangan sumber



pembiayaan alternative bagi pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan air minum yang berbasis pengelolaan oleh masyarakat.

5. Pembangunan lingkungan permukiman diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan dan pedesaan yang baik dan memberikan peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

#### **4.1.2.MEWUJUDKAN Peningkatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat**

Guna tercapainya sasaran pokok maka pembangunan diarahkan pada :

1. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memberi perhatian besar pada pemerataan pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dasar 15 tahun dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kesetaraan gender dan kemudahan akses pendidikan terutama kelompok masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Upaya yang telah dilakukan melalui pembebasan biaya pendidikan dan bantuan buku pelajaran harus didukung pula dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang lebih merata, bermutu dan tepat lokasi, pengembangan kurikulum, bahan pelajaran dan model pembelajaran yang lebih mengacu pada standar nasional dan internasional sesuai dengan perkembangan iptek, budaya dan seni, sehingga sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing dalam era globalisasi Selain itu peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan serta pengembangan manajemen pelayanan pendidikan.
2. Sasaran pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan pada mempercepat proses difusi dan pemanfaatan iptek bagi peningkatan produktifitas dunia usaha dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, unggulan dan strategis serta menumbuhkembangkan mekanisme intermeditasi peningkatan kemudahan akses terhadap fasilitas penyediaan iptek. *Prioritas* diberikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dasar dalam bentuk pengembangan dan penerapan teknologi yang lebih focus di bidang pangan, energi dan manufaktur. Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian dunia usaha, prioritas pembangunan iptek diarahkan pada upaya

penciptaan iklim inovasi dalam bentuk skema intensif bagi terbangunnya penguatan kapasitas lembaga penelitian dan pengembangan.

3. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan lainnya, termasuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta penduduk di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan. Untuk itu upaya yang dilakukan adalah peningkatan lingkungan sehat, upaya kesehatan masyarakat, perorangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan perbaikan gizi masyarakat, upaya peningkatan tersebut didukung oleh meningkatkan lagi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui jaminan kesehatan yang telah dilakukan selama ini, juga peningkatan mutu pemerataan tenaga dan pemberkalan kesehatan dan menejemen pembangunan kesehatan, termasuk system pengembangan informasi kesehatan serta perintisan dan penguatan bidang penelitian dan pengembangan kesehatan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan perumahan yang layak huni, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, pembangunan permukiman dan perumahan diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan perumahan dan kepemilikan rumah, pembangunan rumah sederhana sehat, pemberdayaan komunitas pemukiman yang mendorong pembangunan perumahan swadaya, perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, revitalisasi kawasan serta peremajaan kawasan.
5. Pembangunan Kesejahteraan social diarahkan pada peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan social dan masyarakat rentan lainnya, melalui pemberian bantuan dan jaminan kesehatan social serta pelayanan rehabilitasi kesejahteraan social dan pengembangan system perlindungan social yang sifatnya lebih permanent serta mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penduduk miskin dan rentan.
  - a. Pembangunan bidang perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, Sedangkan pembangunan anak dirioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk hak-hak anak terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social, hukum dan ketenagakerjaan.

- b. Pembangunan agama dan kebudayaan diarahkan pada peningkatan sarana dan fasilitas keagamaan dan mendorong semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing.
- c. Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas pemuda melalui pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak dan disiplin. Sedangkan pembangunan olahraga diprioritaskan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesihatan jasmani dan mental masyarakat, membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
- d. Pembangunan kependudukan dan KB diarahkan pada pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan kualitas pelayanan KB, pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, penyerasian kebijakan kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

### **MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NILAI BUDAYA SETEMPAT**

Pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan nilai budaya setempat diarahkan pada :

1. Memperkuat peran masyarakat sehingga proses pembangunan partisipatory yang bersifat bottom up bisa berjalan.
2. Menumbuhkan masyarakat yang tanggap ( responsive Community ) yang akan mendorong semangat sukarela yang sejalan dengan makna gotong royong, memperkuat kualitas otonomi daerah.
3. Melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat, merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal, melindungi peninggalan budaya dan pengembangan kepariwisataan serta objek-objek wisata Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **4.1.3. MENGEMBANGKAN PEMERINTAHAN YANG ADIL, JUJUR, DAN BERSIH**

Pengembangan pemerintahan yang adil, jujur, dan bersih diarahkan pada :

1. Pembangunan SDM aparatur yang professional dengan peningkatan kemampuan aparatur daerah yang berbasis kompetensi pelayanan prima.
2. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, melembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis. Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat intraktif dan mapun menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah.
3. Penuntasan penganggulan penyalahgunaan kewenangan aparatatur dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemberian sanksi kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku, peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, dan pengawasan masyarakat, seta peningkatan etika birokrasi, etika kepemimpinan dan budaya kerja , pengetahuan, dan pemahaman para aparatur pemerintah terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

#### **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT SERTA KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN**

1. Meningkatkan kinerja pelayanan public yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Prima (SPM) disesuaikan dengan ISO, serta semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ( pelayanan terpadu )
2. Meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
3. pembangunan politik diprioritaskan pada proses penyempurnaan dan penguatan lembaga politik baik lembaga politik baik pada lembaga politik penyelenggara Negara/ daerah maupun lembaga politik kemasyarakatan termasuk hubungan antar lembaga politik tersebut

## 4.2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud diatas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas. Tahapan dan skala prioritas tersebut ditetapkan untuk memberikan arahan pembangunan yang mencerminkan penekanan permasalahan yang akan diselesaikan pada setiap tahapan, oleh karena itu skala prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya.

Periode tahapan yang ditetapkan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin dengan mempertimbangkan kondisi existing (awal) saat ini dan sasaran atau tujuan yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang. Tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin di susun sebagai berikut .

### 4.2.1. RPJM ke-1

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya RPJM ke-1 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sejahtera. Berdasarkan capaian pembangunan sebelumnya dalam RPJM ke-1 ditekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kemandirian , pemerataan pembangunan dengan ditopang dengan pengembangan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang religius guna lebih memantapkan pembangunan disegala bidang menuju Kabupaten Musi Banyuasin yang terdepan.

Kondisi kesejahteraan masyarakat , ditandai dengan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat ditandai dengan peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) ; peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas, akses pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan yang berorientasi global ; peningkatan pendapatan perkapita .

Peningkatan kualitas perekonomian dengan tidak melihat pada pertumbuhan saja, tapi juga pemerataan, upaya yang dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi minimal 13 % tanpa migas dan 6 % dengan Migas digambarkan dengan berkembangnya ekonomi lokal ; berkembangnya dan berperannya kelembagaan ekonomi ; meningkatnya investasi ; meningkatnya pembangunan industri ; berkembangnya pertambangan dan pertanian secara terpadu, pemantapan pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, selain itu ditingkatkannya kualitas perencanaan penataan ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah.

Selain itu meningkatnya pembangunan ekonomi diiringi peningkatan pendapatan perkapita ; penurunan penduduk miskin menjadi tidak lebih dari 20 % ; pengurangan pengangguran menjadi tidak lebih dari 8 %; peningkatan PDRB perkapita dengan memperkuat sektor-sektor basis dan mendorong sektor non basis dan optimalisasi peran BUMD.

Kabupaten Musi Banyuasin yang Mandiri ditandai dengan Peningkatan PAD dan penerimaan lainnya minimal 2,4 trilyun , sehingga Kabupaten Muba dapat membangun daerahnya dengan bertumpu pada kekuatan sendiri dan memperkuat konektivitas dengan daerah lain ; kemandirian pemerintahan ditandai dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, murah, transparan, dan akuntabel; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, jujur dan adil. Selanjutnya kemandirian pemerintahan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan kualitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang adil ditandai dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, baik pembangunan fasilitas umum sosial, dan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah atau daerah sehingga terhapusnya desa tertinggal.

#### 4.2.2. RPJM ke-2

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan kualitas pembangunan untuk lebih mensejahterakan masyarakat disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan penguatan daya saing perekonomian.

Kondisi kesejahteraan masyarakat semakin membaik dengan menurunnya penduduk miskin dan membaiknya indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan perkapita ; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang, kesejahteraan, dan perlindungan anak ; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk ; menurunnya kesenjangan antar individu, kelompok masyarakat, dan antar wilayah, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial dan

strategis ; dan makin mantapnya nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang positif dalam rangka mendukung pemantapan nilai budaya dan karakter bangsa.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian yang tangguh dan peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; lebih memantapkan pembangunan infrastruktur ; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan ; penguatan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut didukung oleh pengembangan jaringan transportasi ; pemanfaatan energi alternatif terbaru ; pengembangan perumahan dan permukiman ; dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam secara sinergi, optimal; dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat; pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing. Kondisi ini didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang, menegakkan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **4.2.3. RPJM ke-3**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan disegala bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Kesejahteraan masyarakat secara merata terus membaik, meningkat diatas kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia semakin membaik dengan terus meningkatnya IPM, semakin meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan didukung manajemen pendidikan yang efisien dan efektif, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat; semakin meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan anak; pemantapan nilai budaya masyarakat yang akan mendukung kemandirian masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap tercermin dengan terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan lingkungan untuk

mendukung kualitas kehidupan ekonomi dan sosial secara serasi, seimbang dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup didukung peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta makin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.

Perekonomian akan semakin kuat dan berdaya saing dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya infrastruktur dengan semakin mantapnya koperasi, UKM dan kerjasama dengan dunia usaha; semakin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Semakin mantapnya penyediaan infrastruktur secara merata disemua wilayah terutama infrastruktur perdesaan dan penerapan teknologi guna mendukung pertanian sesuai dengan rencana tata ruang, semakin mantapnya peningkatan pembangunan pendidikan.

#### **4.2.4. RPJM ke-4**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Musi banyuasin yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Perekonomian semakin maju dan kuat ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif, dan adanya keterpaduan antara pertanian dan industri, dan sektor jasa. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, lembaga ekonomi tertata dan berfungsi dengan baik, semakin meningkatnya peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pergerakan perekonomian. Kondisi ekonomi yang semakin baik didukung oleh pendidikan yang berkualitas, kemampuan iptek yang makin maju guna berkembangnya investasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat mencapai kesejahteraan yang terdepan di kawasan Sumatera Bagian Selatan, dengan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi yang maju dan sejahtera makin terwujud dengan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten, dan terpenuhinya kebutuhan perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana



pendukung melalui sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan.

Untuk memantapkan pembangunan yang berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan semakin meratanya tingkat pendapatan, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui meningkatnya dan meratanya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, efisien dan efektifnya manajemen pendidikan dan meningkatnya kemampuan iptek. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat sebagai indikator meningkatnya IPM Kabupaten Muba sehingga menjadi yang terdepan di kawasan Sumatera Bagian Selatan.

Peran Pemerintah terus meningkat dengan semakin kuatnya kemampuan keuangan daerah guna pelaksanaan pembangunan, kondisi ini didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang adil, jujur, dan bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

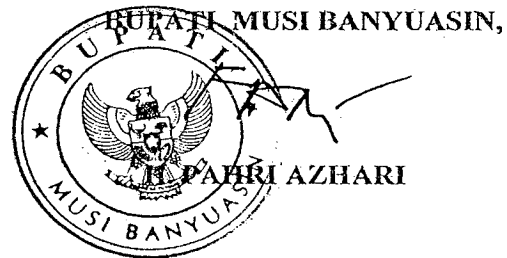
## BAB V

### PENUTUP

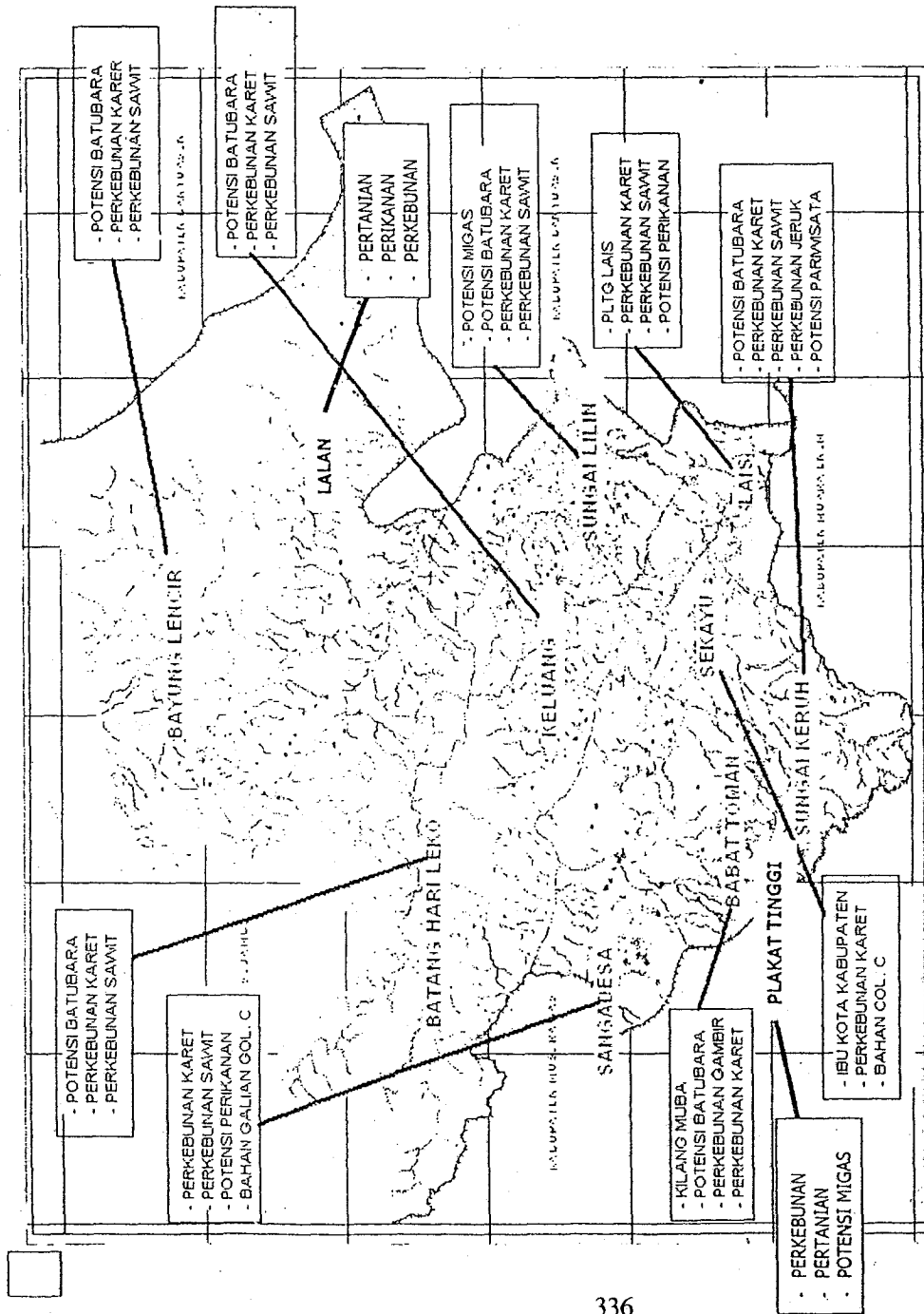
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin 20 tahun kedepan. Implementasi RPJPD dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) secara berkesinambungan. RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Sementara oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RPJMD akan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD sebagai program perencanaan lima tahunan SKPD dan Rencana Kerja Tahunan ( Renja) SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat tergantung pada komitmen kepemimpinan, konsistensi kebijakan pemerintah daerah dan peran aktif stakeholders pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, guna menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 21 JULI 2008



PETA SEBARAN POTENSI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Gambar.2.1  
Peta Sebaran Potensi Sumber Daya Alam

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 21 Juli 2008

